



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan

Paraf		
/	M	/

setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;

- c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende telah memperoleh Persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor: 900/2227/Keuda, tanggal 24 Maret 2021 hal: Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

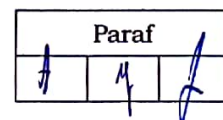
Paraf		
/	/	/

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Paraf		
		

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2014 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 44);



12. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Ende.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Paraf		
		

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Evaluasi Jabatan adalah bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*).
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Paraf		
		

20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun, dengan hak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Paraf		
		

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tempat bertugas;
 - d. Kondisi kerja;
 - e. Kelangkaan profesi;
 - f. Pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi TPP Beban Kerja} = (20\%) \times (\text{Basic TPP})$$

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada seluruh Pegawai ASN.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran basic TPP.

Paraf		
		

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi TPP Prestasi Kerja} = (35\%) \times (\text{Basic TPP})$$

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas kabupaten sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP kabupaten apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi TPP Tempat Bertugas} = (5\%) \times (\text{Basic TPP}) \times (\text{Indeks TPP Tempat Bertugas})$$

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada:
 - a. Dokter;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. pejabat fungsional kesehatan selain dokter;
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP.

Paraf		
		

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi TPP Kondisi Kerja} = (5\%) \times (\text{Basic TPP})$$

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi TPP Kelangkaan Profesi} = (10\%) \times (\text{Basic TPP})$$

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada seluruh Pegawai ASN dengan mempertimbangkan asas keadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN:
- diperbantukan/diperkerjakan pada instansi lain;
 - PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 - PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa Definitif;

Paraf			
			

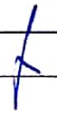
- d. bertugas sebagai Guru yang menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru. Terkecuali PNS yang menerima tambahan penghasilan guru PNS yang besarnya lebih kecil dari besaran TPP, maka yang bersangkutan dapat diberikan selisih dari besaran TPP;
- e. dokter dan jabatan fungsional kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima tunjangan berdasarkan jasa pelayanan;
- f. diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. tugas belajar;
- i. sedang menjalani cuti kecuali cuti tahunan dan cuti bersama;
- j. berstatus sebagai Pegawai titipan di luar wilayah Kabupaten Ende;
- k. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

(2) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, diberikan TPP apabila:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil telah diangkat sebagai PNS, yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pengangkatan;
- b. PPPK telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pengangkatan.

(3) TPP bagi ASN pindahan dari daerah lain, diberikan TPP apabila:

- a. gaji ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.

Paraf		
		

- (4) Dalam hal terjadi mutasi ASN antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
 - b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru;
 - c. perubahan anggaran besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru, dapat dilakukan pada Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP diberikan dengan menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi per Kelas Jabatan.
- (4) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf		
		

BAB V
PENILAIAN TPP

Pasal 12

Penilaian pemberian TPP setiap bulan berdasarkan:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian capaian kinerja terhadap target kinerja dari pejabat penilai terhadap pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Perjanjian Kinerja; atau
 - d. Indikator Kinerja Individu.
- (3) Rangkaian penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan menetapkan sasaran dan target/indikator kinerja pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Sasaran dan target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh atasan langsung.
- (5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja yang dengan kategori sebagai berikut:
 - a. nilai 91,00 sampai dengan 100,00 kategori sangat baik dan dihitung 100%;

Paraf		
		

- b. nilai 76,00 sampai dengan 90,00 kategori baik dan dihitung 90%;
 - c. nilai 61,00 sampai dengan 75,00 kategori cukup dan dihitung 70%;
 - d. nilai 51,00 sampai dengan 60,00 kategori kurang dan dihitung 50%;
 - e. nilai 0,00 sampai dengan 50,00 kategori buruk dan dihitung 30%;
- (2) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Bupati;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah, Inspektur, Sekretaris Sekretariat DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana bidang tugasnya;
 - d. Sekretaris Dinas/Badan, Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi dan pelaksana pada perangkat daerah dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja
- (2) Pegawai ASN tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dianggap masuk kerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian yang menangani urusan kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Paraf		
		

Pasal 16

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan, sebagai berikut:

- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja.

(2) Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 s.d < 30 Menit	0,5%
TL 2	31 s.d. < 61 Menit	1,00%
TL 3	61 s.d. < 91 Menit	1,25%
TL 4	≥ 91 Menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%

- b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 s.d < 30 Menit	0,5%
PSW 2	31 s.d. < 61 Menit	1,00%
PSW 3	61 s.d. < 91 Menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 Menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- c. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Apel Kerja Harian dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% kecuali karena alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung;
- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,5% x jumlah hari kerja karena cuti;
- e. Total pengurangan dihitung dari jumlah akumulasi keterlambatan ditambah pulang kerja sebelum waktunya ditambah tidak mengikuti

Paraf		
		

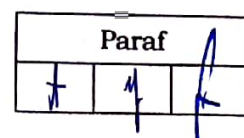
apel pada senin pagi, apel kerja harian dan upacara pada hari kerja ditambah cuti tahunan;

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas Pegawai ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat daftar hadir elektronik maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual.
- (2) Format daftar hadir manual dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) Pegawai ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.



BAB VI PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah pada kode belanja operasi.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dihitung setiap bulan berdasarkan nilai produktivitas kinerja dan rekapitulasi daftar hadir bulanan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsi sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP tertinggi per kelas jabatan; dan
 - b. penilaian kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP tertinggi per kelas jabatan.

Pasal 21

Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwenang, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan dibawah jumlah 12 (dua belas) bulan.

Paraf		
t	M	h

Pasal 23

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas);
- (2) Permintaan pembayaran TPP bulan Desember diajukan sebesar 100% dalam bulan berjalan pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu).

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP dibayar setiap bulan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Capaian produktivitas kinerja dan Kehadiran.
- (3) Dalam rangka memudahkan proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Daftar Pembayaran TPP dan Daftar Penerima TPP disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Laporan Realisasi Pembayaran TPP bulan sebelumnya dari kepala perangkat daerah.
- (2) Format Daftar Pembayaran TPP, Daftar Penerima TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf		
+	4	6

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Besaran TPP bagi jabatan yang belum dilakukan evaluasi jabatan disesuaikan dengan jabatan yang setara sesuai hasil evaluasi jabatan perangkat daerah sebelumnya.

Pasal 28

Plt. diberikan TPP Tambahan, yang menjabat sesuai peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP Tambahan diberikan kepada Sekretaris Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Plt. pada Perangkat Daerah tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt.
- b. TPP Tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Pasal 29

- (1) Pemberian TPP ditunda apabila Pegawai ASN:
 - a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (2) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah melaksanakan kewajibannya maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda, dengan dibuktikan Formulir Bukti Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Paraf		
f	u	/

Pasal 30

- (1) TPP untuk Bulan Januari sampai dengan Juni dibayarkan pada Bulan Juli 2021;
- (2) TPP untuk Bulan Juli sampai dengan Desember dibayarkan setiap bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

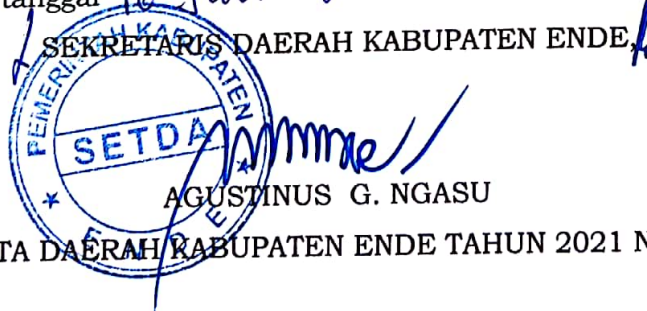
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal, 16 Juli 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Juli 2021



AGUSTINUS G. NGASU
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 15

Paraf			
+	1	4	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 15 TAHUN 2021

TANGGAL 16 Juli 2021

BESARAN TPP ASN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
1	SEKRETARIS DAERAH	15	3.500.000
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	2.400.000
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	2.400.000
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	2.400.000
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1.750.000
6	Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual	9	925.000
7	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
8	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9	925.000
9	Pelaksana	7	750.000
10	Pelaksana	6	700.000
11	Pelaksana	5	550.000
12	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	850.000
	BAGIAN PEMERINTAHAN		
13	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12	1.750.000
14	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	8	850.000
15	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah	9	925.000
16	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	9	925.000
17	Pelaksana	7	750.000
18	Pelaksana	6	700.000
19	Pelaksana	5	550.000
	BAGIAN HUKUM		
20	Kepala Bagian Hukum	12	1.750.000
21	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9	925.000
22	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	925.000
23	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	8	850.000
24	Pelaksana	7	750.000
25	Pelaksana	6	700.000
26	Pelaksana	5	550.000
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
27	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	12	1.750.000
28	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	8	850.000
29	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam	8	850.000
30	Kepala Sub Bagian Perekonomian	9	925.000
31	Pelaksana	7	750.000
32	Pelaksana	6	700.000
33	Pelaksana	5	550.000
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
34	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi	12	1.750.000
35	Kepala Sub Bagian Protokol	9	925.000
36	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	9	925.000
37	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9	925.000
38	Pelaksana	7	750.000
39	Pelaksana	6	700.000
40	Pelaksana	5	550.000
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
41	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	1.750.000
42	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	850.000
43	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program	8	850.000
44	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
45	Pelaksana	7	750.000
46	Pelaksana	5	550.000
47	Pelaksana	6	700.000
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
48	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	1.750.000
49	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi	8	850.000
50	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8	850.000

Paraf

[Signature]

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
51	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	850.000
52	Pelaksana	7	750.000
53	Pelaksana	6	700.000
54	Pelaksana	5	550.000
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
55	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	850.000
56	Pelakang Pertama	8	850.000
BAGIAN ORGANISASI			
57	Kepala Bagian Organisasi	12	1.750.000
58	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	925.000
59	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9	925.000
60	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9	925.000
61	Pelaksana	7	750.000
62	Pelaksana	6	700.000
63	Pelaksana	5	550.000
BAGIAN UMUM			
64	Kepala Bagian Umum	12	1.750.000
65	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	8	850.000
66	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	850.000
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	925.000
68	Pelaksana	7	750.000
69	Pelaksana	6	700.000
70	Pelaksana	5	550.000
71	Pelaksana	3	500.000
72	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	8	850.000
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
73	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	1.750.000
74	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
75	Kepala Sub Bagian Perencanaan	8	850.000
76	Kepala Sub Bagian Pelaporan	8	850.000
77	Pelaksana	7	750.000
78	Pelaksana	6	700.000
79	Pelaksana	5	550.000
STAF AHLI			
80	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2.100.000
81	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2.100.000
82	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	13	2.100.000
II INSPEKTORAT			
83	Inspektur	14	2.400.000
SEKRETARIAT INSPEKTORAT			
84	Sekretaris Inspekturat	12	1.750.000
85	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan	9	1.025.000
86	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	8	900.000
87	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	8	900.000
88	Pelaksana	7	750.000
89	Pelaksana	6	700.000
90	Pelaksana	5	550.000
91	Pelaksana	3	500.000
92	Pelaksana	1	500.000
93	Inspektur Pembantu I	11	1.400.000
94	Inspektur Pembantu II	11	1.400.000
95	Inspektur Pembantu III	11	1.400.000
96	Inspektur Pembantu IV	11	1.400.000
97	Inspektur Pembantu V	11	1.400.000
98	Pelaksana	6	700.000
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
99	Auditor Pertama	8	900.000
100	Auditor Penyelia	8	900.000
101	Auditor Muda	9	1.025.000
102	Auditor Madya	11	1.400.000
103	Auditor Utama	13	2.100.000
104	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	8	900.000
105	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	9	1.025.000

Paraf





No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
106	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	11	1.400.000
III	SEKRETARIAT DPRD		
107	Sekretaris DPRD	14	2.200.000
	BAGIAN UMUM		
108	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	1.350.000
109	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	850.000
110	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	8	850.000
111	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	850.000
112	Pelaksana	7	750.000
113	Pelaksana	6	700.000
114	Pelaksana	5	550.000
115	Pelaksana	3	500.000
116	Pelaksana	1	500.000
	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
117	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang -Undangan	11	1.350.000
118	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	9	925.000
119	Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	8	850.000
120	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	8	850.000
121	Pelaksana	7	750.000
122	Pelaksana	6	700.000
123	Pelaksana	5	550.000
	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
124	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	1.350.000
125	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	8	850.000
126	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	8	850.000
127	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi	8	850.000
128	Pelaksana	7	750.000
129	Pelaksana	6	700.000
130	Pelaksana	5	550.000
IV	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
131	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
132	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	1.650.000
133	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
134	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
135	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
136	Pelaksana	7	750.000
137	Pelaksana	6	700.000
138	Pelaksana	5	550.000
139	Pelaksana	3	500.000
140	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL		
141	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	11	1.350.000
142	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	8	850.000
143	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	8	850.000
144	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang PAUD	8	850.000
145	Pelaksana	7	750.000
146	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		
147	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	1.350.000
148	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	8	850.000
149	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	8	850.000
150	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD	9	925.000
151	Pelaksana	7	750.000
152	Pelaksana	6	700.000
153	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
154	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	1.350.000
155	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	8	850.000
156	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	8	850.000
157	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	8	850.000
158	Pelaksana	7	750.000
159	Pelaksana	6	700.000
160	Pelaksana	5	550.000

Paraf

7 M 1

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN		
161	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaaan	11	1.350.000
162	Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal	8	850.000
163	Kepala Seksi PTK Dikdas	8	850.000
164	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	8	850.000
165	Pelaksana	7	750.000
166	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KEBUDAYAAN		
167	Kepala Bidang Kebudayaan	11	1.350.000
168	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	8	850.000
169	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	8	850.000
170	Kepala Seksi Kesenian	8	850.000
171	Pelaksana	7	750.000
172	Pelaksana	6	700.000
173	Pelaksana	5	550.000
174	Pelaksana	3	500.000
	KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DI SEKOLAH		
175	Pelaksana	7	750.000
176	Pelaksana	6	700.000
177	Pelaksana	5	550.000
178	Pelaksana	3	500.000
	KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL		
179	Guru Pertama	8	850.000
180	Guru Muda	9	925.000
181	Guru Madya	11	1.350.000
182	Pamong Budaya Terampil	6	700.000
183	Pengawas Sekolah Madya	11	1.350.000
184	Pamong Budaya Pertama	8	850.000
185	Pamong Belajar Pertama	8	850.000
186	Pamong Belajar Muda	9	925.000
187	Analisis Kepegawaian Pertama	8	850.000
V	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
188	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	2.400.000
	SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
189	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	1.750.000
190	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.025.000
191	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.025.000
192	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	900.000
193	Pelaksana	7	750.000
194	Pelaksana	6	700.000
195	Pelaksana	5	550.000
196	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN I		
197	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I	11	1.400.000
198	Kepala Sub Bidang Pertanian	8	900.000
199	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah	8	900.000
200	Kepala Sub Bidang Pariwisata, Dunia Usaha dan Keuangan	8	900.000
201	Pelaksana	7	750.000
202	Pelaksana	6	700.000
203	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN II		
204	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II	11	1.400.000
205	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kebencanaan	8	900.000
206	Kepala Sub Bidang SDA dan SDL	8	900.000
207	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Transmigrasi	8	900.000
208	Pelaksana	7	750.000
209	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN III		
210	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III	11	1.400.000
211	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	8	900.000
212	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	8	900.000
213	Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan	8	900.000
214	Pelaksana	7	750.000
215	Pelaksana	6	700.000

Paraf





No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TTP Per Kelas Jabatan (Rp)
1	2	3	4
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN IV		
216	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV	11	1.400.000
217	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	8	900.000
218	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	8	900.000
219	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	9	1.025.000
220	Pelaksana	7	750.000
221	Pelaksana	6	700.000
	VI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
222	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	2.400.000
	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
223	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	1.750.000
224	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	900.000
225	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	900.000
226	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	900.000
227	Pelaksana	7	750.000
228	Pelaksana	6	700.000
229	Pelaksana	5	550.000
230	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG ANGGARAN		
231	Kepala Bidang Anggaran	11	1.400.000
232	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	1.025.000
233	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan	9	1.025.000
234	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	9	1.025.000
235	Pelaksana	7	750.000
236	Pelaksana	6	700.000
237	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PERBENDAHARAAN		
238	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	1.400.000
239	Kepala Sub Bidang Tata Usaha Perbendaharaan	9	1.025.000
240	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Gaji	9	1.025.000
241	Kepala Sub Bidang Pengendalian Keuangan Daerah	8	900.000
242	Pelaksana	7	750.000
243	Pelaksana	6	700.000
244	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG ASET DAERAH		
245	Kepala Bidang Aset Daerah	11	1.400.000
246	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah	9	1.025.000
247	Kepala Sub Bidang Pengembangan Aset Daerah	8	900.000
248	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	9	1.025.000
249	Pelaksana	7	750.000
250	Pelaksana	6	700.000
251	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG AKUNTANSI		
252	Kepala Bidang Akuntansi	11	1.400.000
253	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan	8	900.000
254	Kepala Sub Bidang Verifikasi	9	1.025.000
255	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja	8	900.000
256	Pelaksana	7	750.000
257	Pelaksana	6	700.000
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
258	Penilai Pemerintah Pertama	8	850.000
259	Penata Laksana Barang Terampil	6	700.000
260	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	8	850.000
	VII BADAN PENDAPATAN DAERAH		
261	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	2.400.000
	SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH		
262	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	1.750.000
263	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	900.000
264	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.025.000
265	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	900.000
266	Pelaksana	7	750.000
267	Pelaksana	6	700.000
268	Pelaksana	5	550.000
269	Pelaksana	3	500.000
270	Pelaksana	1	500.000

Paraf

7 4 2

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TTP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN		
271	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	11	1.400.000
272	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan	8	900.000
273	Kepala Sub Bidang Penetapan	8	900.000
274	Kepala Sub Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi	8	900.000
275	Pelaksana	7	750.000
276	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENAGIHAN DAN PENYULUHAN		
277	Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan	11	1.400.000
278	Kepala Sub Bidang Penagihan	9	1.025.000
279	Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan	8	900.000
280	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Piutang	8	900.000
281	Pelaksana	7	750.000
282	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PBB P2 DAN BPHTB		
283	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	11	1.400.000
284	Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9	1.025.000
285	Kepala Sub Bidang BPHTB	8	900.000
286	Kepala Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Pengembangan	8	900.000
287	Pelaksana	7	750.000
288	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN		
290	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan	11	1.400.000
291	Kepala Sub Bidang Pengendalian	8	900.000
292	Kepala Sub Bidang Pengawasan	8	900.000
293	Kepala Sub Bidang Pelaporan	8	900.000
294	Pelaksana	7	750.000
295	Pelaksana	6	700.000
296	Pelaksana	5	550.000
	VIII BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
297	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2.200.000
	SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
298	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	12	1.650.000
299	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
301	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
302	Pelaksana	7	750.000
303	Pelaksana	6	700.000
304	Pelaksana	5	550.000
305	Pelaksana	3	500.000
306	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI		
307	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	11	1.350.000
308	Kepala Sub Bidang Formasi & Pengadaan Pegawai	8	850.000
309	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan	9	925.000
310	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai	9	925.000
311	Pelaksana	7	750.000
312	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
314	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian	11	1.350.000
315	Kepala Sub Bidang Mutasi Kepangkatan	8	850.000
316	Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai	8	850.000
317	Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian	8	850.000
318	Pelaksana	7	750.000
319	Pelaksana	6	700.000
320	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
321	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	1.350.000
322	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS	9	925.000
323	Kepala Sub Bidang Pendidikan & Pelatihan Teknis Fungsional	8	850.000
324	Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal ASN & Non ASN	8	850.000
325	Pelaksana	7	750.000
326	Pelaksana	6	700.000
327	Pelaksana	5	550.000

Paraf

+

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG KESEJAHTERAAN, CUTI DAN Pensiun PNS		
328	Kepala Bidang Kesejahteraan, Cuti dan Pensiun PNS	11	1.350.000
329	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	8	850.000
330	Kepala Sub Bidang Cuti Pegawai	8	850.000
331	Kepala Sub Bidang Pensiun PNS	9	925.000
332	Pelaksana	7	750.000
333	Pelaksana	5	550.000
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
334	Analisis Kepegawaian Mahir	7	750.000
335	Analisis Kepegawaian Terampil	6	700.000
336	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	850.000
337	Analisis Kepegawaian Pertama	8	850.000
338	Analisis Kepegawaian Muda	9	925.000
339	Analisis Kepegawaian Madya	11	1.350.000
340	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
	IX DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
341	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
342	Sekretaris Dinas Komunikasi dan informatika	12	1.650.000
343	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
344	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
345	Pelaksana	7	750.000
346	Pelaksana	6	700.000
347	Pelaksana	5	550.000
348	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG LAYANAN ELECTRONIC-GOVERNMENT		
349	Kepala Bidang Layanan Electronic-Government	11	1.350.000
350	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	8	850.000
351	Kepala Seksi Layanan Teknologi Informasi	8	850.000
352	Kepala Seksi Tata Kelola Electronic- Government	8	850.000
353	Pelaksana	7	750.000
354	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
355	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	1.350.000
356	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	8	850.000
357	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	9	925.000
358	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	8	850.000
359	Pelaksana	7	750.000
360	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
361	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	1.350.000
362	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	8	850.000
363	Kepala Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi	8	850.000
364	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	8	850.000
365	Pelaksana	6	700.000
366	Pelaksana	5	550.000
	X DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
367	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
368	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	1.650.000
369	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
370	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
371	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
372	Pelaksana	7	750.000
373	Pelaksana	6	700.000
374	Pelaksana	5	550.000
375	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG TATA LINGKUNGAN		
376	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	1.350.000
377	Kepala Seksi Inventarisasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	850.000
378	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup	8	850.000
379	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	8	850.000
380	Pelaksana	7	750.000
381	Pelaksana	6	700.000

Paraf		
t	4	N

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)		
382	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	11	1.350.000
383	Kepala Seksi Pengurangan sampah	9	925.000
384	Kepala Seksi Penanganan sampah	8	850.000
385	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	9	925.000
386	Pelaksana	7	750.000
387	Pelaksana	6	700.000
388	Pelaksana	5	550.000
389	Pelaksana	3	500.000
390	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
391	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	11	1.350.000
392	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan	9	925.000
393	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	8	850.000
394	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	8	850.000
395	Pelaksana	7	750.000
396	Pelaksana	6	700.000
397	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		
398	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11	1.350.000
399	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8	850.000
400	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	8	850.000
401	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	8	850.000
402	Pelaksana	7	750.000
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN		
403	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	9	925.000
404	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	850.000
405	Pelaksana	7	750.000
406	Pelaksana	6	700.000
407	Pelaksana	5	550.000
	XI DINAS PARIWISATA		
408	Kepala Dinas Pariwisata	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA		
409	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	1.650.000
410	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
411	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
412	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
413	Pelaksana	7	750.000
414	Pelaksana	6	700.000
415	Pelaksana	5	550.000
416	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG DESTINASI		
417	Kepala Bidang Destinasi	11	1.350.000
418	Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata	9	925.000
419	Kepala Seksi Usaha Rekreasi dan Aneka Hiburan	8	850.000
420	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Wisata Khusus	8	850.000
421	Pelaksana	7	750.000
422	Pelaksana	6	700.000
423	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN		
424	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran	11	1.350.000
425	Kepala Seksi Promosi	8	850.000
426	Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi	8	850.000
427	Kepala Seksi Pengembangan Citra Pariwisata	8	850.000
428	Pelaksana	7	750.000
429	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA		
430	Kepala Bidang Industri Pariwisata	11	1.350.000
431	Kepala Seksi Akomodasi	8	850.000
432	Kepala Seksi Restoran dan Rumah Makan	8	850.000
433	Kepala Seksi Usaha Perjalanan Wisata	8	850.000
434	Pelaksana	7	750.000
435	Pelaksana	6	700.000
436	Pelaksana	5	550.000

Paraf

+

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG KELEMBAGAAN		
437	Kepala Bidang Kelembagaan	11	1.350.000
438	Kepala Seksi Penyuluhan	8	850.000
439	Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan/Kelembagaan	8	850.000
440	Kepala Seksi Pelatihan dan Ketrampilan	8	850.000
441	Pelaksana	7	750.000
442	Pelaksana	6	700.000
	XII DINAS PERHUBUNGAN		
443	Kepala Dinas Perhubungan	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN		
444	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	1.650.000
445	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
446	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
447	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	850.000
448	Pelaksana	7	750.000
449	Pelaksana	6	700.000
450	Pelaksana	5	550.000
451	Pelaksana	3	500.000
452	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PENATAAN SISTEM PERHUBUNGAN		
453	Kepala Bidang Penataan Sistem Perhubungan	11	1.350.000
454	Kepala Seksi Perencanaan Sistem Perhubungan	8	850.000
455	Kepala Seksi Pengendalian Perijinan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	8	850.000
456	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	8	850.000
457	Pelaksana	7	750.000
458	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT		
459	Kepala Bidang Perhubungan Darat	11	1.350.000
460	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dan Keselamatan	8	850.000
461	Kepala Seksi Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Penyeberangan	8	850.000
462	Kepala Seksi Pra Sarana Perhubungan Darat dan Parkir	8	850.000
463	Pelaksana	6	700.000
464	Pelaksana	5	550.000
465	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT		
466	Kepala Bidang Perhubungan Laut	11	1.350.000
467	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	8	850.000
468	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	8	850.000
469	Kepala Seksi Kepelabuhan	8	850.000
470	Pelaksana	7	750.000
471	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PERHUBUNGAN UDARA		
472	Kepala Bidang Perhubungan Udara	11	1.350.000
473	Kepala Seksi Kebandarudaraan	8	850.000
474	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan	8	850.000
475	Kepala Seksi Angkutan Udara	8	850.000
476	Pelaksana	7	750.000
477	Pelaksana	6	700.000
	UPT PARKIR DAN TERMINAL		
478	Kepala UPTD Parkir dan Terminal	9	925.000
479	Kepala Tata Usaha UPT Parkir dan Terminal	8	850.000
480	Pelaksana	5	550.000
481	Pelaksana	3	500.000
	KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL		
482	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	5	550.000
	XIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
483	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
484	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	1.650.000
485	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
486	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
487	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
488	Pelaksana	7	750.000
489	Pelaksana	6	700.000
490	Pelaksana	5	550.000

Paraf

h M K

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
491	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
492	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	1.350.000
493	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	850.000
494	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	850.000
495	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	8	850.000
496	Pelaksana	7	750.000
497	Pelaksana	6	700.000
498	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		
499	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	1.350.000
500	Kepala Seksi Kelahiran	8	850.000
501	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	8	850.000
502	Kepala Seksi Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	8	850.000
503	Pelaksana	6	700.000
504	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PENGELOLA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
505	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	11	1.350.000
506	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	850.000
507	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	8	850.000
508	Kepala Seksi Tata Kelola, SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	850.000
509	Pelaksana	7	750.000
510	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		
511	Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	11	1.350.000
512	Kepala Seksi Kerja Sama	8	850.000
513	Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan	8	850.000
514	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	8	850.000
515	Pelaksana	7	750.000
516	Pelaksana	6	700.000
XIV	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
517	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
518	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	1.650.000
519	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
520	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
521	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
522	Pelaksana	7	750.000
523	Pelaksana	6	700.000
524	Pelaksana	5	550.000
525	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT		
526	Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong Masyarakat	11	1.350.000
527	Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Pengembangan Akses Informasi Masyarakat	9	925.000
528	Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
529	Kepala Seksi Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya Gotong Royong Masyarakat	8	850.000
530	Pelaksana	7	750.000
531	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA		
532	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna	11	1.350.000
533	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	850.000
534	Kepala Seksi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa	9	925.000
535	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	8	850.000
536	Pelaksana	7	750.000
537	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA		
538	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa	11	1.350.000
539	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa	8	850.000
540	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa	9	925.000
541	Kepala Seksi Advokasi Peraturan Desa, Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa	8	850.000
542	Pelaksana	7	750.000
543	Pelaksana	6	700.000

Paraf

1 4 1

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PEMERINTAHAN DESA		
544	Kepala Bidang Pemerintahan Desa		
545	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa	11	1.350.000
546	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa	8	850.000
547	Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa	9	925.000
548	Pelaksana	8	850.000
549	Pelaksana	7	750.000
	XV DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	6	700.000
550	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		
	SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	2.200.000
551	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		
552	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12	1.650.000
553	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	850.000
554	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
555	Pelaksana	8	850.000
556	Pelaksana	7	750.000
557	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	5	550.000
558	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		
559	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	11	1.350.000
560	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	9	925.000
561	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	8	850.000
562	Pelaksana	8	850.000
563	Pelaksana	7	750.000
564	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	5	550.000
565	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal		
566	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	11	1.350.000
567	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	850.000
568	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	8	850.000
569	Pelaksana	8	850.000
	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	7	750.000
570	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		
571	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	11	1.350.000
572	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	8	850.000
573	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	8	850.000
574	Pelaksana	8	850.000
575	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	5	550.000
576	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan		
577	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	11	1.350.000
578	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	8	850.000
579	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	8	850.000
580	Pelaksana	8	850.000
581	Pelaksana	7	750.000
	XVI DINAS KESEHATAN	6	700.000
582	Kepala Dinas Kesehatan		
	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	14	2.200.000
583	Sekretaris Dinas Kesehatan		
584	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12	1.650.000
585	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
586	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
587	Pelaksana	9	925.000
588	Pelaksana	7	750.000
589	Pelaksana	6	700.000
590	Pelaksana	5	550.000
591	Pelaksana	3	500.000
		1	500.000

Paraf		

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		
		11	1.350.000
592	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	9	925.000
593	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	925.000
594	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	925.000
595	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	7	750.000
596	Pelaksana	6	700.000
597	Pelaksana		
	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
		11	1.350.000
598	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8	850.000
599	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	925.000
600	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		
601	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	850.000
602	Pelaksana	7	750.000
603	Pelaksana	6	700.000
604	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
		11	1.350.000
605	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	9	925.000
606	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	8	850.000
607	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	850.000
608	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	7	750.000
609	Pelaksana	6	700.000
610	Pelaksana		
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN		
		11	1.350.000
611	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	9	925.000
612	Kepala Seksi Kefarmasian	8	850.000
613	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan	9	925.000
614	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	7	750.000
615	Pelaksana	6	700.000
616	Pelaksana	5	550.000
617	Pelaksana		
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		
		8	850.000
618	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8	850.000
619	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	7	750.000
620	Pelaksana	6	700.000
621	Pelaksana	5	550.000
622	Pelaksana		
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
		8	900.000
623	Perawat Penyelia	7	750.000
624	Asisten Apoteker Mahir	6	700.000
625	Asisten Apoteker Terampil	8	900.000
626	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	7	750.000
627	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
628	Perekam Medis Mahir	11	1.400.000
629	Apoteker Madya	7	750.000
630	Nutrisiionis Mahir	7	750.000
631	Epidemiolog Kesehatan Mahir	9	1.025.000
632	Epidemiolog Kesehatan Muda	8	900.000
633	Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama	9	1.025.000
634	Penyuluh Kesehatan Muda	7	750.000
635	Sanitarian Mahir		
	UPTD PUSKESMAS KOTA BARU		
		9	925.000
636	Kepala UPTD Puskesmas Kotabaru	6	700.000
637	Pelaksana	5	550.000
638	Pelaksana	4	500.000
639	Pelaksana	12	1.750.000
640	Dokter Gigi Madya	9	1.025.000
641	Perawat Muda	8	900.000
642	Perawat Penyelia	8	900.000
643	Perawat Pertama	7	750.000
644	Perawat Mahir	6	700.000
645	Perawat Terampil	6	700.000
646	Perawat Gigi Terampil	9	1.025.000
647	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	8	900.000
648	Bidan Penyelia		

Paraf

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
649	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
650	Sanitarian Penyelia	8	900.000
651	Nutrisiionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
652	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
653	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	6	700.000
654	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
UPTD PUSKESMAS MAUROLE			
655	Kepala UPTD Puskesmas Maurole	9	925.000
656	Pelaksana	4	500.000
657	Pelaksana	5	550.000
658	Pelaksana	6	700.000
659	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
660	Nutrisiionis Pelaksana/Terampil	6	700.000
661	Nutrisiionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
662	Apoteker Pertama	8	900.000
663	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
664	Perawat Penyelia	8	900.000
665	Perawat Mahir	7	750.000
666	Perawat Terampil	6	700.000
667	Bidan Penyelia	8	900.000
668	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
669	Bidan Muda	9	1.025.000
670	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
671	Dokter Gigi Pertama	9	1.025.000
672	Sanitarian Penyelia	8	900.000
673	Fisioterapis Pertama	8	900.000
674	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
675	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	750.000
UPTD PUSKESMAS WOLOWARU			
676	Kepala UPTD Puskesmas Wolowaru	9	925.000
677	Pelaksana	5	550.000
678	Pelaksana	6	700.000
679	Bidan Pertama	8	900.000
680	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
681	Bidan Penyelia	8	900.000
682	Bidan Madya	11	1.400.000
683	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
684	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	700.000
685	Dokter Muda	10	1.200.000
686	Dokter Gigi Muda	10	1.200.000
687	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	6	700.000
688	Sanitarian Penyelia	8	900.000
689	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	900.000
690	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
691	Nutrisiionis Terampil	6	700.000
692	Perawat Terampil	6	700.000
693	Perawat Penyelia	8	900.000
694	Perawat Mahir	7	750.000
695	Perawat Muda	9	1.025.000
696	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
697	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
698	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
UPTD PUSKESMAS REWARANGGA			
730	Kepala UPTD Puskesmas Rewarangga	9	925.000
731	Pelaksana	5	550.000
732	Pelaksana	6	700.000
733	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
734	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.025.000
735	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
736	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	750.000
737	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	900.000
738	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
739	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
740	Teknisi Elektromedis Terampil	6	700.000
741	Nutrisiionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000

Paraf

1 4 1

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
742	Perekam Medis Terampil	6	700.000
743	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
744	Apoteker Pertama	8	900.000
745	Apoteker Muda	9	1.025.000
746	Asisten Apoteker Muda	9	1.025.000
747	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
748	Perawat Penyelia	8	900.000
749	Perawat Mahir	7	750.000
750	Perawat Terampil	6	700.000
751	Perawat Pertama	8	900.000
752	Sanitarian Penyelia	8	900.000
753	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
754	Bidan Penyelia	8	900.000
755	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
756	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
757	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
758	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
759	Dokter Muda	10	1.200.000
UPTD PUSKESMAS RUKUN LIMA			
760	Kepala UPTD Puskesmas Rukun Lima	9	925.000
761	Pelaksana	6	700.000
762	Pelaksana	5	550.000
763	Dokter Madya	12	1.750.000
764	Dokter Muda	10	1.200.000
765	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	750.000
766	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
767	Sanitarian Penyelia	8	900.000
768	Sanitarian Mahir	7	750.000
769	Nutrisi Penyelia	8	900.000
770	Perawat Penyelia	8	900.000
771	Perawat Mahir	7	750.000
772	Perawat Terampil	6	700.000
773	Perawat Muda	8	900.000
774	Apoteker Pertama	8	900.000
775	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
776	Bidan Penyelia	8	900.000
777	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
778	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
779	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
780	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
781	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
782	Epidemiolog Pertama	8	900.000
UPTD PUSKESMAS MONI			
783	Kepala UPTD Puskesmas Moni	9	925.000
784	Pelaksana	4	500.000
785	Pelaksana	5	550.000
786	Pelaksana	6	700.000
787	Bidan Pertama	8	900.000
788	Bidan Penyelia	8	900.000
789	Bidan Mahir	7	750.000
790	Bidan Terampil	6	700.000
791	Dokter Pertama	9	1.025.000
792	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
793	Sanitarian Pemula	5	550.000
794	Perawat Penyelia	8	900.000
795	Perawat Mahir	7	750.000
796	Perawat Terampil	6	700.000
797	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
798	Nutrisi Terampil	6	700.000
799	Teknisi Elektromedis Terampil	6	700.000
801	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
802	Perawat Gigi Terampil	6	700.000

Paraf		
/	/	/

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	UPTD PUSKESMAS NANGAPANDA		
803	Kepala UPTD Puskesmas Nangapanda	9	925.000
804	Pelaksana	6	700.000
805	Pelaksana	4	500.000
806	Pelaksana	5	550.000
807	Bidan Penyelia	8	900.000
808	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
809	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
810	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
811	Apoteker Muda	9	1.025.000
812	Perawat Terampil	6	700.000
813	Perawat Mahir	7	750.000
814	Perawat Penyelia	8	900.000
815	Perawat Pertama	8	900.000
816	Sanitarian Penyelia	8	900.000
817	Dokter Madya	12	1.750.000
818	Dokter Gigi Muda	10	1.200.000
819	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
820	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
821	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
	UPTD PUSKESMAS MAUKARO		
822	Kepala UPTD Puskesmas Maukaro	9	925.000
823	Pelaksana	6	700.000
824	Pelaksana	4	500.000
825	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
826	Perawat Mahir	7	750.000
827	Perawat Penyelia	8	900.000
828	Perawat Terampil	6	700.000
829	Perawat Pertama	8	900.000
830	Bidan Penyelia	8	900.000
831	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
832	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
833	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
834	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
835	Apoteker Madya	11	1.400.000
	UPTD PUSKESMAS RIARAJA		
836	Kepala UPTD Puskesmas Riaraja	9	925.000
837	Pelaksana	4	500.000
838	Pelaksana	5	550.000
839	Pelaksana	6	700.000
840	Perawat Pertama	8	900.000
841	Perawat Muda	9	1.025.000
842	Perawat Penyelia	8	900.000
843	Perawat Mahir	7	750.000
844	Perawat Terampil	6	700.000
845	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
846	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
847	Bidan Penyelia	8	900.000
848	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
849	Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	6	700.000
850	Asisten Apoteker Mahir	7	750.000
851	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
852	Sanitarian Penyelia	8	900.000
853	Sanitarian Pelaksana/Terampil	6	700.000
855	Nutrisi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
856	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
857	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	750.000
858	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
859	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
	UPTD PUSKESMAS KOTA ENDE		
860	Kepala UPTD Puskesmas Kota Ende	9	925.000
861	Pelaksana	4	500.000
862	Pelaksana	5	550.000
863	Pelaksana	6	700.000
864	Perawat Muda	9	1.025.000

Paraf

7 4 2

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
865	Perawat Terampil	6	700.000
866	Perawat Mahir	7	750.000
867	Perawat Penyelia	8	900.000
868	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
869	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	700.000
870	Sanitarian Penyelia	8	900.000
871	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
872	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
873	Bidan Muda	9	1.025.000
874	Bidan Penyelia	8	900.000
875	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
876	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
877	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
878	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
879	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
880	Dokter Pertama	9	1.025.000
881	Dokter Gigi Muda	10	1.200.000
882	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
883	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
884	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
885	Nutrisi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
886	Epidemiolog Pertama	8	900.000
UPTD PUSKESMAS KOTARATU			
887	Kepala UPTD Puskesmas Kotaratu	9	925.000
888	Pelaksana	5	550.000
889	Pelaksana	6	700.000
890	Pelaksana	4	500.000
891	Pelaksana	1	500.000
892	Sanitarian Penyelia	8	900.000
893	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
894	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
895	Bidan Madya	11	1.400.000
896	Bidan Muda	9	1.025.000
897	Bidan Penyelia	8	900.000
898	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
899	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
900	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
901	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
902	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
903	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
904	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
905	Nutrisi Penyelia	8	900.000
906	Perawat Pertama	8	900.000
907	Perawat Penyelia	8	900.000
908	Perawat Mahir	7	750.000
909	Perawat Terampil	6	700.000
910	Dokter Madya	12	1.750.000
911	Dokter Pertama	9	1.025.000
912	Dokter Gigi Madya	12	1.750.000
913	Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.025.000
914	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
915	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
UPTD PUSKESMAS ONEKORE			
916	Kepala UPTD Puskesmas Onekore	9	925.000
917	Pelaksana	5	550.000
918	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	6	700.000
919	Dokter Pertama	9	1.025.000
920	Sanitarian Penyelia	8	900.000
921	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
922	Bidan Penyelia	8	900.000
923	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
924	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
925	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
926	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
927	Teknisi Elektromedis Terampil	6	700.000

Paraf		
/	M	/

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
928	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
929	Asisten Apoteker Terampil	6	700.000
930	Asisten Apoteker Mahir	7	750.000
931	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
932	Perawat Mahir	7	750.000
933	Perawat Penyelia	8	900.000
934	Perawat Muda	8	900.000
935	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
936	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
937	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
938	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	900.000
UPTD PUSKESMAS NGALUPOLO			
939	Kepala UPTD Puskesmas Ngalupolo	9	925.000
940	Pelaksana	5	550.000
941	Pelaksana	6	700.000
942	Perawat Ahli Pertama	8	900.000
943	Perawat Penyelia	8	900.000
944	Perawat Mahir	7	750.000
945	Perawat Terampil	6	700.000
946	Bidan Muda	9	1.025.000
947	Bidan Penyelia	8	900.000
948	Bidan Mahir	7	750.000
949	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
950	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
951	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
952	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
953	Dokter Pertama	9	1.025.000
954	Perekam Medis Terampil	6	700.000
955	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
956	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
957	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
958	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
UPTD PUSKESMAS NDETUNDORA			
959	Kepala UPTD Puskesmas Ndetundora	9	925.000
960	Pelaksana	1	500.000
961	Pelaksana	5	550.000
962	Pelaksana	4	500.000
963	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
964	Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	6	700.000
965	Bidan Penyelia	8	900.000
966	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
967	Bidan Pertama	8	900.000
968	Sanitarian Penyelia	8	900.000
969	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
970	Dokter Muda	10	1.200.000
971	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
972	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
973	Perawat Penyelia	8	900.000
974	Perawat Mahir	7	750.000
975	Perawat Terampil	6	700.000
976	Perawat Pertama	8	900.000
UPTD PUSKESMAS DETUSOKO			
977	Kepala UPTD Puskesmas Detusoko	9	925.000
978	Pelaksana	5	550.000
979	Pelaksana	6	700.000
980	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
981	Perawat Madya	11	1.400.000
982	Perawat Muda	9	1.025.000
983	Perawat Pertama	8	900.000
984	Perawat Mahir	7	750.000
985	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
986	Perawat Penyelia	8	900.000
987	Apoteker Pertama	8	900.000
988	Apoteker Pemula	5	550.000
989	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	6	700.000

Paraf		
t	M	K

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
990	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
991	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
992	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
993	Sanitarian Penyelia	8	900.000
994	Sanitarian Pelaksana/Terampil	6	700.000
995	Dokter Muda	10	1.200.000
996	Dokter Pertama	9	1.025.000
UPTD PUSKESMAS SAGA			
997	Kepala UPTD Puskesmas Saga	9	925.000
998	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	6	700.000
999	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
1000	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1001	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1002	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1003	Bidan Penyelia	8	900.000
1004	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1005	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1006	Nutrisi Terampil	6	700.000
1007	Perawat Penyelia	8	900.000
1008	Perawat Mahir	7	750.000
1009	Perawat Terampil	6	700.000
1010	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
1011	Nutrisi Pelaksana/Terampil	6	700.000
UPTD PUSKESMAS WELAMOSA			
1012	Kepala UPTD Puskesmas Welamosa	9	925.000
1013	Pelaksana	5	550.000
1014	Pelaksana	6	700.000
1015	Perawat Mahir	7	750.000
1016	Perawat Penyelia	8	900.000
1017	Perawat Pertama	7	750.000
1018	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1019	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1020	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1021	Bidan Penyelia	8	900.000
1022	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1023	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1024	Dokter Pertama	9	1.025.000
1025	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
1026	Fisioterapis Pertama	7	750.000
UPTD PUSKESMAS WOJOJITA			
1027	Kepala UPTD Puskesmas Wolojita	9	925.000
1028	Pelaksana	5	550.000
1029	Pelaksana	4	500.000
1030	Pelaksana	6	700.000
1031	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1032	Nutrisi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1033	Perawat Penyelia	8	900.000
1034	Perawat Mahir	7	750.000
1035	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
1036	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
1037	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1038	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1039	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1040	Bidan Penyelia	8	900.000
1041	Sanitarian Penyelia	8	900.000
1042	Sanitarian Pelaksana/Terampil	6	700.000
1043	Dokter Muda	10	1.200.000
UPTD PUSKESMAS ROGA			
1044	Kepala UPTD Puskesmas Roga	9	925.000
1045	Pelaksana	5	550.000
1046	Pelaksana	6	700.000
1047	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1048	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
1049	Sanitarian Mahir	7	750.000
1050	Sanitarian Penyelia	8	900.000

Paraf		
		

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1051	Bidan Penyelia	8	900.000
1052	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1053	Perawat Penyelia	8	900.000
1054	Perawat Mahir	7	750.000
1055	Perawat Pertama	8	900.000
1056	Perawat Terampil	6	700.000
1057	Perawat Ahli Pertama	8	900.000
1058	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
UPTD PUSKESMAS MAUBASA			
1059	Kepala UPTD Puskesmas Maubasa	9	925.000
1060	Pelaksana	6	700.000
1061	Pelaksana	5	550.000
1062	Dokter Muda	10	1.200.000
1063	Dokter Pertama	9	1.025.000
1064	Pelaksana	5	550.000
1065	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1066	Perawat Penyelia	8	900.000
1067	Perawat Mahir	7	750.000
1068	Perawat Terampil	6	700.000
1069	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
1070	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	550.000
1071	Sanitarian Mahir	7	750.000
1072	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1073	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	700.000
UPTD PUSKESMAS WATUNESO			
1074	Kepala UPTD Puskesmas Watuneso	9	925.000
1075	Pelaksana	5	550.000
1076	Bidan Penyelia	8	900.000
1077	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1078	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1079	Apoteker Muda	9	1.025.000
1080	Nutrisi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1081	Perawat Mahir	7	750.000
1082	Perawat Penyelia	8	900.000
1083	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1084	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
1085	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
1086	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
UPTD PUSKESMAS WATUNGGERE			
1087	Kepala UPTD Puskesmas Watunggere	9	925.000
1088	Pelaksana	6	700.000
1089	Asisten Apoteker Pemula	5	550.000
1090	Asisten Apoteker Muda	9	1.025.000
1091	Perawat Penyelia	8	900.000
1092	Perawat Mahir	7	750.000
1093	Perawat Terampil	6	700.000
1094	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1095	Perawat Gigi Terampil	6	700.000
1096	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
1097	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1098	Sanitarian Mahir	7	750.000
1099	Sanitarian Penyelia	8	900.000
1100	Bidan Penyelia	8	900.000
1101	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1102	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
UPTD PUSKESMAS AHMAD YANI			
1103	Kepala UPTD Puskesmas Ahmad Yani	9	925.000
1104	Pelaksana	5	550.000
1105	Pelaksana	6	700.000
1106	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1107	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1108	Bidan Pertama	8	900.000
1109	Teknisi Elektromedia Terampil	6	700.000
1110	Nutrisi Penyelia	8	900.000
1111	Nutrisi Muda	8	900.000

Paraf		
/	/	/

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1112	Perawat Penyelia	8	900.000
1113	Perawat Mahir	7	750.000
1114	Perawat Terampil	6	700.000
1115	Sanitarian Mahir	7	750.000
1116	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
	UPTD PUSKESMAS PEIBENGA		
1117	Kepala UPTD Puskesmas Peibenga	9	925.000
1118	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
1119	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1120	Bidan Pertama	8	900.000
1121	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1122	Bidan Penyelia	8	900.000
1123	Dokter Pertama	9	1.025.000
1124	Teknisi Elektromedis Terampil	6	700.000
1125	Nutrisi Pelaksana/Terampil	6	700.000
1126	Apoteker Pertama	8	900.000
1127	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1128	Perawat Penyelia	8	900.000
1129	Perawat Mahir	7	750.000
1130	Perawat Terampil	6	700.000
	UPTD PUSKESMAS LOBONIKI		
1131	Kepala UPTD Puskesmas Loboniki	9	925.000
1132	Perawat Mahir	7	750.000
1133	Perawat Penyelia	8	900.000
1134	Perawat Terampil	6	700.000
1135	Perawat Pertama	8	900.000
1136	Bidan Penyelia	8	900.000
1137	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1138	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
1139	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
	UPTD PUSKESMAS MUKUSAKI		
1140	Kepala UPTD Puskesmas Mukusaki	9	925.000
1141	Pelaksana	5	550.000
1142	Perawat Mahir	7	750.000
1143	Perawat Penyelia	8	900.000
1144	Perawat Terampil	6	700.000
1145	Perawat Pertama	8	900.000
1146	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1147	Bidan Penyelia	8	900.000
1148	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1149	Bidan Pelaksana/Terampil	6	700.000
XVII	DINAS KETAHANAN PANGAN		
1150	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN		
1151	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	1.650.000
1152	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1153	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1154	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1155	Pelaksana	7	750.000
1156	Pelaksana	6	700.000
1157	Pelaksana	5	550.000
1158	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN		
1159	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	11	1.350.000
1160	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	8	850.000
1161	Kepala Seksi Sumber Daya Pangan	8	850.000
1162	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	8	850.000
1163	Pelaksana	7	750.000
1164	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN		
1165	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	11	1.350.000
1166	Kepala Seksi Distribusi Pangan	8	850.000
1167	Kepala Seksi Harga Pangan	9	925.000
1168	Kepala Seksi Cadangan Pangan	8	850.000
1169	Pelaksana	7	750.000

Paraf		
1	4	2

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1170	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KONSUMSI DAN PANGANEKARAGAMAN PANGAN		
1165	Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan	11	1.350.000
1166	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	8	850.000
1167	Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	9	925.000
1168	Kepala Seksi Promosi Pengembangan Pangan Lokal	9	925.000
1169	Pelaksana	7	750.000
	BIDANG KEAMANAN PANGAN		
1170	Kepala Bidang Keamanan Pangan	11	1.350.000
1171	Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan	8	850.000
1172	Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	8	850.000
1173	Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	8	850.000
1174	Pelaksana	7	750.000
1175	Pelaksana	6	700.000
	XVIII DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1176	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1177	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	1.650.000
1178	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1179	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1180	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1181	Pelaksana	7	750.000
1182	Pelaksana	6	700.000
1183	Pelaksana	5	550.000
1184	Pelaksana	3	500.000
1185	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN		
1186	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan	11	1.350.000
1187	Kepala Seksi Perizinan	8	850.000
1188	Kepala Seksi Kelembagaan	8	850.000
1189	Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi	8	850.000
1190	Pelaksana	7	750.000
1191	Pelaksana	6	700.000
1192	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN		
1193	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	11	1.350.000
1194	Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi	8	850.000
1195	Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	8	850.000
1196	Kepala Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi	8	850.000
1197	Pelaksana	7	750.000
1198	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI		
1199	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	11	1.350.000
1200	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	8	850.000
1201	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	8	850.000
1202	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	8	850.000
1203	Pelaksana	7	750.000
1204	Pelaksana	6	700.000
1205	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO		
1206	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	11	1.350.000
1207	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	8	850.000
1208	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	9	925.000
1209	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	8	850.000
1210	Pelaksana	7	750.000
1211	Pelaksana	6	700.000
1212	Pelaksana	5	550.000
	XIX DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1213	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1214	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	1.650.000
1215	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1216	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1217	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1218	Pelaksana	7	750.000

Paraf

7 4 2

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1219	Pelaksana	6	700.000
1220	Pelaksana	5	550.000
1221	Pelaksana	3	500.000
1222	Pelaksana	1	500.000
BIDANG SURVEY, PENGENDALIAN DAN BINA PROGRAM			
1223	Kepala Bidang Survey, Pengendalian dan Bina Program	11	1.350.000
1224	Kepala Seksi Survey, Pengendalian dan Penyusunan Program Kebinamargaan	8	850.000
1225	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyusunan Program Pengairan dan Air Bersih	9	925.000
1226	Kepala Seksi Survey, Pengendalian dan Penyusunan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Penataan Ruang	8	850.000
1227	Pelaksana	7	750.000
1228	Pelaksana	6	700.000
1229	Pelaksana	5	550.000
BIDANG BINA MARGA			
1230	Kepala Bidang Bina Marga	11	1.350.000
1231	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan	9	925.000
1232	Kepala Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	9	925.000
1233	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8	850.000
1234	Pelaksana	7	750.000
1235	Pelaksana	6	700.000
1236	Pelaksana	5	550.000
BIDANG PENGAIRAN			
1237	Kepala Bidang Pengairan	11	1.350.000
1238	Kepala Seksi Perencanaan Teknik Pengujian Pengairan dan Evaluasi	8	850.000
1239	Kepala Seksi Pembangunan Pengairan	8	850.000
1240	Kepala Seksi Penyuluhan, Operasi dan Pemeliharaan	9	925.000
1241	Pelaksana	7	750.000
1242	Pelaksana	6	700.000
1243	Pelaksana	5	550.000
1244	Pelaksana	3	500.000
BIDANG AIR BERSIH			
1245	Kepala Bidang Air Bersih	11	1.350.000
1246	Kepala Seksi Perencanaan Air Bersih	9	925.000
1247	Kepala Seksi Pembangunan Air Bersih	8	850.000
1248	Kepala Seksi Pemeliharaan Air Bersih	9	925.000
1249	Pelaksana	7	750.000
1250	Pelaksana	6	700.000
1251	Pelaksana	5	550.000
BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN			
1252	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	1.350.000
1253	Kepala Seksi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	9	925.000
1254	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	8	850.000
1255	Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	8	850.000
1256	Pelaksana	7	750.000
1257	Pelaksana	5	550.000
1258	Pelaksana	1	500.000
BIDANG PENATAAN RUANG			
1259	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	1.350.000
1260	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan	9	925.000
1261	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan	9	925.000
1262	Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	8	850.000
1263	Pelaksana	7	750.000
1264	Pelaksana	6	700.000
1265	Pelaksana	5	550.000
UPTD PERALATAN			
1266	Kepala UPTD Peralatan	9	925.000
1267	Kepala Tata Usaha Peralatan	8	850.000
1268	Pelaksana	7	750.000
1269	Pelaksana	5	550.000
1270	Pelaksana	3	500.000

Paraf

1 1 2

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
XX	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1271	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1272	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	1.650.000
1273	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1274	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi Pelaporan	9	925.000
1275	Pelaksana	7	750.000
1276	Pelaksana	6	700.000
1277	Pelaksana	5	550.000
1278	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG KEPEMUDAAN		
1279	Kepala Bidang Kepemudaan	11	1.350.000
1280	Kepala Seksi Lembaga dan Produktifitas Kepemudaan	8	850.000
1281	Kepala Seksi Prasarana dan Pemberdayaan Kepemudaan	8	850.000
1282	Kepala Seksi Peningkatan Wawasan, Kreatifitas, Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Pemuda	8	850.000
1283	Pelaksana	7	750.000
1284	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KEOLAHRAGAAN		
1285	Kepala Bidang Keolahragaan	11	1.350.000
1286	Kepala Seksi Olahraga dan Kelembagaan	8	850.000
1287	Kepala Seksi Pengkaderan dan Prestasi Olahraga	8	850.000
1288	Kepala Seksi Pembinaan Organisasi, Pendidikan dan Pengembangan Olahraga	8	850.000
1289	Pelaksana	7	750.000
1290	Pelaksana	6	700.000
1291	Pelaksana	5	550.000
XXI	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1292	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1293	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	1.650.000
1294	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1295	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1296	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1297	Pelaksana	7	750.000
1298	Pelaksana	6	700.000
1299	Pelaksana	5	550.000
1300	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK		
1301	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	11	1.350.000
1302	Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	9	925.000
1303	Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	8	850.000
1304	Kepala Seksi Data dan Informasi	9	925.000
1305	Pelaksana	7	750.000
	BIDANG KELUARGA BERENCANA		
1306	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11	1.350.000
1307	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi (Alkon)	9	925.000
1308	Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	9	925.000
1309	Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB)	9	925.000
1310	Pelaksana	7	750.000
	BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		
1311	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	1.350.000
1312	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	8	850.000
1313	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia	8	850.000
1314	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	8	850.000
1315	Pelaksana	7	750.000
1316	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN		
1317	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	11	1.350.000
1318	Kepala Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	8	850.000
1319	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	850.000
1320	Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan IMP	8	850.000
1321	Pelaksana	7	750.000
1322	Pelaksana	6	700.000

Paraf		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TTP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
XXII	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
1323	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
1324	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12	1.650.000
1325	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1326	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1327	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1328	Pelaksana	7	750.000
1329	Pelaksana	6	700.000
1330	Pelaksana	5	550.000
1331	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PERDAGANGAN		
1332	Kepala Bidang Perdagangan	11	1.350.000
1333	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	9	925.000
1334	Kepala Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran	8	850.000
1335	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan	8	850.000
1336	Pelaksana	7	750.000
1337	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN		
1338	Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan	11	1.350.000
1339	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan	9	925.000
1340	Kepala Seksi Penataan, Penertiban dan Retribusi Pasar	8	850.000
1341	Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	8	850.000
1342	Pelaksana	7	750.000
1343	Pelaksana	6	700.000
1344	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		
1345	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	11	1.350.000
1346	Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen	8	850.000
1347	Kepala Seksi Standardisasi dan Tertib Niaga	8	850.000
1348	Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	9	925.000
1349	Pelaksana	7	750.000
1350	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG INDUSTRI		
1351	Kepala Bidang Industri	11	1.350.000
1352	Kepala Seksi Industri Pangan, Industri Barang dari Kayu dan Furniture	8	850.000
1353	Kepala Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Elektronika dan Sumber Daya Mineral	8	850.000
1354	Kepala Seksi Industri Sandang dan Kerajinan	8	850.000
1355	Pelaksana	7	750.000
	UPTD METROLOGI		
1356	Kepala UPTD Metrologi	9	925.000
1357	Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi	8	850.000
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
1358	Penera Terampil	6	700.000
1359	Penera Mahir	7	750.000
1360	Pengamat Tera Terampil	6	700.000
1361	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	6	700.000
XXIII	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1362	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1363	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	1.650.000
1364	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
1365	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	850.000
1366	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1367	Pelaksana	7	750.000
1368	Pelaksana	6	700.000
1369	Pelaksana	5	550.000
1370	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN		
1371	Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	11	1.350.000
1372	Kepala Seksi Deposit dan Akuisisi	8	850.000
1373	Kepala Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Alih Media	8	850.000
1374	Kepala Seksi Konservasi dan Penjilidan	8	850.000

Paraf		
1	4	1

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1375	Pelaksana	6	700.000
1376	Pelaksana	5	550.000
BIDANG LAYANAN OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN			
1377	Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	11	1.350.000
1378	Kepala Seksi Layanan Perpustakaan	9	925.000
1379	Kepala Seksi Otomasi Perpustakaan	8	850.000
1380	Kepala Seksi Kerjasama Perpustakaan	8	850.000
1381	Pelaksana	7	750.000
1382	Pelaksana	6	700.000
1383	Pelaksana	5	550.000
BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI			
1384	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Keagamaan Membaca	11	1.350.000
1385	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan	8	850.000
1386	Kepala Seksi Pengembangan Keagamaan Membaca	8	850.000
1387	Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Perpustakaan	8	850.000
1388	Pelaksana	7	750.000
1389	Pelaksana	6	700.000
1390	Pelaksana	5	550.000
BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN, LAYANAN, PEMANFAATAN DAN JASA KEARSIPAN			
1391	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan, Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	11	1.350.000
1392	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	8	850.000
1393	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan	8	850.000
1394	Kepala Seksi Pemanfaatan Arsip Statis	8	850.000
1395	Pelaksana	7	750.000
1396	Pelaksana	6	700.000
BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN ARSIP STATIS			
1397	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	11	1.350.000
1398	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif, Arsip Vital dan Arsip Aset Nasional	8	850.000
1399	Kepala Seksi Alih Media, Reproduksi dan Preservasi Kearsipan	8	850.000
1400	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Akuisisi Arsip	8	850.000
1401	Pelaksana	6	700.000
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
1402	Arsiparis Terampil	6	700.000
1403	Arsiparis Mahir	7	750.000
1404	Arsiparis Pertama	8	850.000
1405	Pustakawan Pertama	8	850.000
1406	Pustakawan Mahir	7	750.000
XXIV DINAS PERTANIAN			
1407	Kepala Dinas Pertanian	14	2.200.000
SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN			
1408	Sekretaris Dinas Pertanian	12	1.650.000
1409	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
1410	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1411	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1412	Pelaksana	7	750.000
1413	Pelaksana	6	700.000
1414	Pelaksana	5	550.000
1415	Pelaksana	3	500.000
1416	Pelaksana	1	500.000
BIDANG TANAMAN PANGAN			
1417	Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	1.350.000
1418	Kepala Seksi Sereal	9	925.000
1419	Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi	9	925.000
1420	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	8	850.000
1421	Pelaksana	7	750.000
1422	Pelaksana	6	700.000
1423	Pelaksana	5	550.000
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
1424	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	1.350.000
1425	Kepala Seksi Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak	9	925.000
1426	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	8	850.000
1427	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9	925.000

Paraf

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1428	Pelaksana	7	750.000
1429	Pelaksana	6	700.000
1430	Pelaksana	5	550.000
1431	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG HORTIKULTURA		
1432	Kepala Bidang Hortikultura	11	1.350.000
1433	Kepala Seksi Buah dan Florikultura	8	850.000
1434	Kepala Seksi Sayuran dan Tanaman Obat	8	850.000
1435	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	8	850.000
1436	Pelaksana	7	750.000
1437	Pelaksana	6	700.000
1438	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		
1439	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11	1.350.000
1440	Kepala Seksi Perluasan Areal, Irigasi dan Perlindungan Lahan	8	850.000
1441	Kepala Seksi Alat dan Mesin Pertanian	9	925.000
1442	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman, Pupuk dan Pestisida	9	925.000
1443	Pelaksana	7	750.000
1444	Pelaksana	6	700.000
1445	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PERKEBUNAN		
1446	Kepala Bidang Perkebunan	11	1.350.000
1447	Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	8	850.000
1448	Kepala Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	925.000
1449	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	850.000
1450	Pelaksana	7	750.000
1451	Pelaksana	6	700.000
1452	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN		
1453	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	11	1.350.000
1454	Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan	8	850.000
1455	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan	8	850.000
1456	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Penyuluhan	8	850.000
1457	Pelaksana	7	750.000
1458	Pelaksana	6	700.000
1459	Pelaksana	5	550.000
	UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
1460	Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	925.000
1461	Kepala Tata Usaha	8	850.000
1462	Pelaksana	5	550.000
1463	Pengawas Benih Tanaman Pemula	5	550.000
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
1464	Penyuluh Pertanian Pertama	8	850.000
1465	Penyuluh Pertanian Muda	9	925.000
1466	Penyuluh Pertanian Madya	11	1.350.000
1467	Penyuluh Pertanian Utama	13	2.100.000
1468	Penyuluh Pertanian Pemula	5	550.000
1469	Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil	6	700.000
1470	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000
1471	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	850.000
1472	Paramedik Veteriner Pertama	8	850.000
1473	Paramedik Veteriner Muda	9	925.000
1474	Paramedik Veteriner Pemula	5	550.000
1475	Paramedik Veteriner Terampil	6	700.000
1476	Paramedik Veteriner Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	750.000
1477	Paramedik Veteriner Penyelia	8	850.000
1478	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	5	550.000
1479	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	6	700.000
1480	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	7	750.000
1481	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8	850.000
1482	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	8	850.000
1483	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	11	1.350.000
1484	Pengawas Mutu Pakan Pemula	5	550.000
1485	Pengawas Mutu Pakan Mahir	7	750.000

Paraf		
7	14	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1486	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8	850.000
1487	Pengawas Mutu Pakan Pertama	8	850.000
1488	Pengawas Bibit Ternak Pertama	8	850.000
1489	Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	8	850.000
1490	Analisis Pasar Hasil Pertanian Mahir	7	750.000
XXV	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1491	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1492	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12	1.650.000
1493	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1494	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1495	Pelaksana	7	750.000
1496	Pelaksana	6	700.000
1497	Pelaksana	5	550.000
1498	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PERUMAHAN		
1499	Kepala Bidang Perumahan	11	1.350.000
1500	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perumahan	9	925.000
1501	Kepala Seksi Pembangunan Perumahan	9	925.000
1502	Kepala Seksi Pengembangan Perumahan	8	850.000
1503	Pelaksana	7	750.000
1504	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		
1505	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	11	1.350.000
1506	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman	8	850.000
1507	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	8	850.000
1508	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	8	850.000
1509	Pelaksana	7	750.000
1510	Pelaksana	6	700.000
1511	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PERTANAHAN		
1512	Kepala Bidang Pertanahan	11	1.350.000
1513	Kepala Seksi Permasalahan Tanah	8	850.000
1514	Kepala Seksi Inventarisasi Tanah	8	850.000
1515	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	8	850.000
1516	Pelaksana	7	750.000
1517	Pelaksana	6	700.000
1518	Pelaksana	5	550.000
XXVI	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1519	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1520	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	1.650.000
1521	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
1522	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1523	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1524	Pelaksana	7	750.000
1525	Pelaksana	6	700.000
1526	Pelaksana	5	550.000
1527	Pelaksana	3	500.000
1528	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PELAYANAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		
1529	Kepala Bidang Pelayanan Pemberdayaan Sosial	11	1.350.000
1530	Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Pelestarian Keperintisan	8	850.000
1531	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	8	850.000
1532	Kepala Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	8	850.000
1533	Pelaksana	7	750.000
1534	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1535	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11	1.350.000
1536	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	8	850.000
1537	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	8	850.000
1538	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	8	850.000

Paraf

+

+

+

+

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1539	Pelaksana	7	750.000
1540	Pelaksana	6	700.000
1541	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		
1542	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	11	1.350.000
1543	Kepala Seksi Bantuan Sosial Penanganan Bencana	8	850.000
1544	Kepala Seksi Bantuan Sosial Pekerja Migran dan Orang Terlantar	8	850.000
1545	Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Sosial	8	850.000
1546	Pelaksana	7	750.000
1547	Pelaksana	6	700.000
1548	Pelaksana	5	550.000
1549	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1550	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak	11	1.350.000
1551	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan	8	850.000
1552	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak	8	850.000
1553	Kepala Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8	850.000
1554	Pelaksana	7	750.000
1555	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA		
1556	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	11	1.350.000
1557	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	8	850.000
1558	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	8	850.000
1559	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	8	850.000
1560	Pelaksana	7	750.000
1561	Pelaksana	6	700.000
	XXVII DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
1562	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14	2.200.000
	SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
1563	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12	1.650.000
1564	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1565	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1566	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1567	Pelaksana	7	750.000
1568	Pelaksana	6	700.000
1569	Pelaksana	5	550.000
1570	Pelaksana	3	500.000
1571	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		
1572	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	1.350.000
1573	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja	9	925.000
1574	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	8	850.000
1575	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	8	850.000
1576	Pelaksana	7	750.000
1577	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA		
1578	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja	11	1.350.000
1579	Kepala Seksi Organisasi, Syarat Kerja dan Norma Ketenagakerjaan	9	925.000
1580	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	8	850.000
1581	Kepala Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja	8	850.000
1582	Pelaksana	7	750.000
1583	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI		
1584	Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	11	1.350.000
1585	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	8	850.000
1586	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Transmigrasi	8	850.000
1587	Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi	8	850.000
1588	Pelaksana	7	750.000
1589	Pelaksana	6	700.000

Paraf

1 1 1

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11	1.350.000
1590	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8	850.000
1591	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan	8	850.000
1592	Kepala Seksi Peningkatan Sosial Ekonomi	8	850.000
1593	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	750.000
1594	Pelaksana	6	700.000
1595	Pelaksana		
	BIDANG PERENCANAAN	11	1.350.000
1596	Kepala Bidang Perencanaan	8	850.000
1597	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	8	850.000
1598	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8	850.000
1599	Kepala Seksi Perencanaan Ketenagakerjaan	7	750.000
1600	Pelaksana	6	700.000
1601	Pelaksana		
	UPTD LATIHAN KERJA	9	925.000
1602	Kepala UPTD Latihan Kerja	8	850.000
1603	Kepala Tata Usaha UPTD Latihan Kerja	5	550.000
1604	Pelaksana		
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	11	1.350.000
1605	Instruktur Madya	8	850.000
1606	Instruktur Penyelia		
XXVIII	DINAS PERIKANAN	14	2.200.000
1607	Kepala Dinas Perikanan		
	SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN	12	1.650.000
1608	Sekretaris Dinas Perikanan	8	850.000
1609	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
1610	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1611	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	7	750.000
1612	Pelaksana	6	700.000
1613	Pelaksana	5	550.000
1614	Pelaksana	3	500.000
1615	Pelaksana	1	500.000
1616	Pelaksana		
	BIDANG PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	11	1.350.000
1617	Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap	8	850.000
1618	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan Kecil	8	850.000
1619	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap	8	850.000
1620	Kepala Seksi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil	7	750.000
1621	Pelaksana	6	700.000
1622	Pelaksana		
	BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	11	1.350.000
1623	Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan	8	850.000
1624	Kepala Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Perikanan	8	850.000
1625	Kepala Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan	8	850.000
1626	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengelolaan PPI	7	750.000
1627	Pelaksana	6	700.000
1628	Pelaksana		
	BIDANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	11	1.350.000
1629	Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	8	850.000
1630	Kepala Seksi Kerjasama Pembangunan Kawasan Budidaya Perikanan	8	850.000
1631	Kepala Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	8	850.000
1632	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Perbenihan Perikanan	7	750.000
1633	Pelaksana	6	700.000
1634	Pelaksana	5	550.000
1635	Pelaksana		
	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN USAHA KECIL PERIKANAN		
1636	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan	11	1.350.000
1637	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Kecil	9	925.000
1638	Kepala Seksi Pengelolaan Kemitraan Usaha dan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) Usaha Budidaya Perikanan	8	850.000
1639	Kepala Seksi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Kecil	8	850.000
1640	Pelaksana	7	750.000
1641	Pelaksana	6	700.000

Paraf		
		

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL		
1642	Penyuluh Perikanan Pemula	5	550.000
1643	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	750.000
1644	Pengawas Perikanan Pertama	8	850.000
1645	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula	5	550.000
1646	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	8	850.000
1647	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	6	700.000
1648	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	8	850.000
1649	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	8	850.000
1650	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	550.000
1651	Pengawas Perikanan Terampil	6	700.000
XXIX	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH		
1652	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	14	2.200.000
	SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH		
1653	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	12	1.650.000
1654	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1655	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1656	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	8	850.000
1657	Pelaksana	7	750.000
1658	Pelaksana	6	700.000
1659	Pelaksana	5	550.000
1660	Pelaksana	3	500.000
1661	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA		
1662	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11	1.350.000
1663	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	925.000
1664	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	8	850.000
1665	Pelaksana	7	750.000
1666	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		
1667	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11	1.350.000
1668	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	8	850.000
1669	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik	8	850.000
1670	Pelaksana	7	750.000
1671	Pelaksana	6	700.000
1672	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1673	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	11	1.350.000
1674	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	9	925.000
1675	Kepala Sub Bidang Organisasi	8	850.000
1676	Pelaksana	7	750.000
1677	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		
1677	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	1.350.000
1678	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Inteljen	8	850.000
1679	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik	8	850.000
1680	Pelaksana	7	750.000
XXX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1681	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2.200.000
	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1682	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1.650.000
1683	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1684	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1685	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1686	Pelaksana	7	750.000
1687	Pelaksana	6	700.000
1688	Pelaksana	5	550.000
1689	Pelaksana	3	500.000
1690	Pelaksana	1	500.000

Paraf

+

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	5	550.000
1642	Penyuluh Perikanan Pemula	7	750.000
1643	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	8	850.000
1644	Pengawas Perikanan Pertama	5	550.000
1645	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula	8	850.000
1646	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	6	700.000
1647	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	8	850.000
1648	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	8	850.000
1649	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	5	550.000
1650	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	6	700.000
1651	Pengawas Perikanan Terampil		
XXIX	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH	14	2.200.000
1652	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah		
	SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH		
1653	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	12	1.650.000
1654	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1655	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1656	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	8	850.000
1657	Pelaksana	7	750.000
1658	Pelaksana	6	700.000
1659	Pelaksana	5	550.000
1660	Pelaksana	3	500.000
1661	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA		
1662	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11	1.350.000
1663	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	925.000
1664	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	8	850.000
1665	Pelaksana	7	750.000
1666	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		
1667	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11	1.350.000
1668	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	8	850.000
1669	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik	8	850.000
1670	Pelaksana	7	750.000
1671	Pelaksana	6	700.000
1672	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1673	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	11	1.350.000
1674	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	9	925.000
1675	Kepala Sub Bidang Organisasi	8	850.000
1676	Pelaksana	7	750.000
1677	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		
1677	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	1.350.000
1678	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Inteljen	8	850.000
1679	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik	8	850.000
1680	Pelaksana	7	750.000
XXX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1681	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2.200.000
	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1682	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1.650.000
1683	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1684	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1685	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1686	Pelaksana	7	750.000
1687	Pelaksana	6	700.000
1688	Pelaksana	5	550.000
1689	Pelaksana	3	500.000
1690	Pelaksana	1	500.000

Paraf		
		

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
1691	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	1.350.000
1692	Kepala Seksi Pencegahan	8	850.000
1693	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	8	850.000
1694	Pelaksana	7	750.000
	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
1695	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	1.350.000
1696	Kepala Seksi Kedaruratan	8	850.000
1697	Kepala Seksi Logistik	8	850.000
1698	Pelaksana	7	750.000
1699	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
1700	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	1.350.000
1701	Kepala Seksi Rehabilitasi	8	850.000
1702	Kepala Seksi Rekonstruksi	8	850.000
1703	Pelaksana	7	750.000
1704	Pelaksana	6	700.000
	XXXI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1705	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2.200.000
	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1706	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	1.650.000
1707	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1708	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	850.000
1709	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8	850.000
1710	Pelaksana	7	750.000
1711	Pelaksana	6	700.000
1712	Pelaksana	5	550.000
1713	Pelaksana	3	500.000
1714	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
1715	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	11	1.350.000
1716	Kepala Seksi Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	8	850.000
1717	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	9	925.000
1718	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	9	925.000
1719	Pelaksana	7	750.000
1720	Pelaksana	6	700.000
	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		
1721	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	1.350.000
1722	Kepala Seksi Operasi	8	850.000
1723	Kepala Seksi Pengendalian	8	850.000
1724	Kepala Seksi Kerjasama	8	850.000
1725	Pelaksana	7	750.000
1726	Pelaksana	6	700.000
1727	Pelaksana	5	550.000
1728	Pelaksana	3	500.000
	BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SUMBER DAYA APARATUR		
1729	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	11	1.350.000
1730	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	8	850.000
1731	Kepala Seksi Teknis Fungsional	8	850.000
1732	Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Satuan Pol.PP	8	850.000
1733	Pelaksana	7	750.000
1734	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN		
1735	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	1.350.000
1736	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	8	850.000
1737	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	8	850.000
1738	Kepala Seksi Rehabilitasi	8	850.000
1739	Pelaksana	7	750.000
1740	Pelaksana	6	700.000
1741	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1742	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11	1.350.000
1743	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	8	850.000
1744	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	8	850.000
1745	Kepala Seksi Pencegahan, Mitigasi dan Pengerahan Sumber Daya	9	925.000

Paraf		
+	M	/

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp)
1	2	3	4
1746	Pelaksana	7	750.000
1747	Pelaksana	5	550.000
XXXII	RUMAH BAKIT UMUM DAERAH		
1748	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	13	2.100.000
	BAGIAN TATA USAHA RUMAH BAKIT UMUM DAERAH		
1749	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	11	1.350.000
1750	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	925.000
1751	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	925.000
1752	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	925.000
1753	Pelaksana	7	750.000
1754	Pelaksana	6	700.000
1755	Pelaksana	5	550.000
1756	Pelaksana	4	500.000
1757	Pelaksana	3	500.000
1758	Pelaksana	1	500.000
	BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK		
1759	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	11	1.350.000
1760	Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum	9	925.000
1761	Kepala Seksi Pelayanan Medik Spesialis dan Subspesialis	9	925.000
1762	Pelaksana	7	750.000
1763	Pelaksana	6	700.000
1764	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		
1765	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	11	1.350.000
1766	Kepala Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan	9	925.000
1767	Kepala Seksi Pelayanan Asuhan Kebidanan	9	925.000
1768	Pelaksana	7	750.000
1769	Pelaksana	5	550.000
	BIDANG PELAYANAN NONMEDIK		
1770	Kepala Bidang Pelayanan Nonmedik	11	1.350.000
1771	Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian	9	925.000
1772	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang	9	925.000
1773	Pelaksana	7	750.000
1774	Pelaksana	6	700.000
1775	Pelaksana	5	550.000
1776	Pelaksana	3	500.000
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
1777	Perawat Ahli Pertama	8	900.000
1778	Perawat Muda	9	1.025.000
1779	Perawat Madya	11	1.400.000
1780	Perawat Terampil	6	700.000
1781	Perawat Mahir	7	750.000
1782	Perawat Penyelia	8	900.000
1783	Dokter Pertama	9	1.025.000
1784	Dokter Muda	10	1.200.000
1785	Dokter Madya	12	1.750.000
1786	Dokter Utama	13	2.150.000
1787	Apoteker Pertama	8	900.000
1788	Apoteker Muda	9	1.025.000
1789	Apoteker Madya	11	1.400.000
1790	Apoteker Utama	13	2.150.000
1791	Fisioterapis Pertama	8	900.000
1792	Fisioterapis Muda	9	1.025.000
1793	Fisioterapis Madya	11	1.400.000
1794	Fisioterapis Terampil	6	700.000
1795	Fisioterapis Mahir	7	750.000
1796	Fisioterapis Penyelia	8	900.000
1797	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	550.000
1798	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	700.000
1799	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	750.000
1800	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	900.000
1801	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	900.000
1802	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.025.000
1803	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.400.000
1804	Bidan Pertama	8	900.000

Paraf

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1805	Bidan Muda	9	1.025.000
1806	Bidan Madya	11	1.400.000
1807	Bidan Terampil	6	700.000
1808	Bidan Mahir	7	750.000
1809	Bidan Penyelia	8	900.000
1810	Perekam Medis Pertama	8	900.000
1811	Perekam Medis Muda	9	1.025.000
1812	Perekam Medis Madya	11	1.400.000
1813	Perekam Medis Terampil	6	700.000
1814	Perekam Medis Mahir	7	750.000
1815	Perekam Medis Penyelia	8	900.000
1816	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	900.000
1817	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.025.000
1818	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.400.000
1819	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	700.000
1820	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	750.000
1821	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	900.000
1822	Dokter Gigi Pertama	9	1.025.000
1823	Dokter Gigi Muda	10	1.200.000
1824	Dokter Gigi Madya	12	1.750.000
1825	Dokter Gigi Utama	13	2.150.000
1826	Nutrisionis Pertama	8	900.000
1827	Nutrisionis Muda	9	1.025.000
1828	Nutrisionis Madya	11	1.400.000
1829	Nutrisionis Terampil	6	700.000
1830	Nutrisionis Mahir	7	750.000
1831	Nutrisionis Penyelia	8	900.000
1832	Asisten Apoteker Pemula	5	550.000
1833	Asisten Apoteker Terampil	6	700.000
1834	Asisten Apoteker Mahir	7	750.000
1835	Asisten Apoteker Penyelia	8	900.000
1836	Perawat Gigi Penyelia	8	900.000
1837	Perawat Gigi Mahir	7	750.000
1838	Radiografer Penyelia	8	900.000
1839	Radiografer Mahir	7	750.000
1840	Radiografer Terampil	6	700.000
1841	Refraksionis Penyelia	8	900.000
1842	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	900.000
1843	Sanitarian Terampil	6	700.000
1844	Sanitarian Penyelia	8	900.000
1845	Teknisi Elektromedis Terampil	8	900.000
XXXIII KECAMATAN NDONA			
1846	Camat Ndona	12	1.750.000
1847	Sekretaris Kecamatan Ndona	11	1.350.000
1848	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
1849	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1850	Kepala Seksi Pemerintahan	9	925.000
1851	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	925.000
1852	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
1853	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1854	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
1855	Pelaksana	7	750.000
1856	Pelaksana	6	700.000
1857	Pelaksana	5	550.000
1858	Pelaksana	3	500.000
KELURAHAN ONELAKO			
1859	Lurah Onelako	9	925.000
1860	Sekretaris Kelurahan Onelako	8	850.000
1861	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1862	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1863	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1864	Pelaksana	7	750.000
1865	Pelaksana	6	700.000
1866	Pelaksana	5	550.000
1867	Pelaksana	1	500.000

Paraf

t	M	P
---	---	---

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
	KELURAHAN LOKOBOKO		
1868	Lurah Lokoboko	9	925.000
1869	Sekretaris Kelurahan Lokoboko	8	850.000
1870	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1871	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1872	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1873	Pelaksana	7	750.000
1874	Pelaksana	6	700.000
1875	Pelaksana	5	550.000
1876	Pelaksana	1	500.000
	XXXIV KECAMATAN ENDE TENGAH		
1879	Camat Ende Tengah	12	1.750.000
1880	Sekretaris Kecamatan Ende Tengah	11	1.350.000
1881	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
1882	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1883	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
1884	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
1885	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
1886	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1887	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
1888	Pelaksana	7	750.000
1889	Pelaksana	6	700.000
1890	Pelaksana	5	550.000
1891	Pelaksana	3	500.000
	KELURAHAN PAUPIRE		
1892	Lurah Paupire	9	925.000
1893	Sekretaris Kelurahan Paupire	8	850.000
1894	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1895	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1896	Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat	8	850.000
1897	Pelaksana	7	750.000
1898	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN ONEKORE		
1899	Lurah Onekore	9	925.000
1900	Sekretaris Kelurahan Onekore	8	850.000
1901	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban	8	850.000
1902	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1903	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1904	Pelaksana	7	750.000
1905	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN KELIMUTU		
1906	Lurah Kelimutu	9	925.000
1907	Sekretaris Kelurahan Kelimutu	8	850.000
1908	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1909	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1910	Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat	8	850.000
1911	Pelaksana	7	750.000
1912	Pelaksana	6	700.000
1913	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN POTULANDO		
1914	Lurah Potulando	9	925.000
1915	Sekretaris Kelurahan Potulando	8	850.000
1916	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1917	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1918	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1919	Pelaksana	7	750.000
1920	Pelaksana	5	550.000
	XXXV KECAMATAN ENDE TIMUR		
1921	Camat Ende Timur	12	1.750.000
1922	Sekretaris Kecamatan Ende Timur	11	1.350.000
1923	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
1924	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1925	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
1926	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
1927	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000

Paraf		
1	2	3

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1928	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1929	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
1930	Pelaksana	7	750.000
1931	Pelaksana	6	700.000
1932	Pelaksana	5	550.000
1933	Pelaksana	3	500.000
1934	Pelaksana	1	500.000
KELURAHAN REWARANGGA			
1935	Lurah Rewarangga	9	925.000
1936	Sekretaris Kelurahan Rewarangga	8	850.000
1937	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1938	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1939	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1940	Pelaksana	7	750.000
1941	Pelaksana	6	700.000
1942	Pelaksana	5	550.000
KELURAHAN REWARANGGA SELATAN			
1943	Lurah Rewarangga Selatan	9	925.000
1944	Sekretaris Kelurahan Rewarangga Selatan	8	850.000
1945	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1946	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1947	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1948	Pelaksana	7	750.000
1949	Pelaksana	6	700.000
1950	Pelaksana	5	550.000
1951	Pelaksana	1	500.000
KELURAHAN MAUTAPAGA			
1952	Lurah Mautapaga	9	925.000
1953	Sekretaris Kelurahan Mautapaga	8	850.000
1954	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1955	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
1956	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1957	Pelaksana	7	750.000
1958	Pelaksana	6	700.000
1959	Pelaksana	5	550.000
XXXVI KECAMATAN ENDE SELATAN			
1960	Camat Ende Selatan	12	1.750.000
1961	Sekretaris Kecamatan Ende Selatan	11	1.350.000
1962	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
1963	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
1964	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
1965	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
1966	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
1967	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
1968	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1969	Pelaksana	7	750.000
1970	Pelaksana	6	700.000
1971	Pelaksana	5	550.000
1972	Pelaksana	3	500.000
KELURAHAN TETANDARA			
1973	Lurah Tetandara	9	925.000
1974	Sekretaris Kelurahan Tetandara	8	850.000
1975	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1976	Kepala Seksi Perekonomi dan Pembangunan	8	850.000
1977	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1978	Pelaksana	7	750.000
1979	Pelaksana	6	700.000
1980	Pelaksana	5	550.000
KELURAHAN TANJUNG			
1981	Lurah Tanjung	9	925.000
1982	Sekretaris Kelurahan Tanjung	8	850.000
1983	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1984	Kepala Seksi Perekonomi dan Pembangunan	8	850.000
1985	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1986	Pelaksana	7	750.000

Paraf		
T	M	P

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
1987	Pelaksana	6	700.000
1988	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN PAUPANDA		
1989	Lurah Paupanda	9	925.000
1990	Sekretaris Kelurahan Paupanda	8	850.000
1991	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
1992	Kepala Seksi Perekonomi dan Pembangunan	8	850.000
1993	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
1994	Pelaksana	7	750.000
1995	Pelaksana	6	700.000
1996	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN MBONGAWANI		
1997	Lurah Mbongawani	9	925.000
1998	Sekretaris Kelurahan Mbongawani	8	850.000
1999	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2000	Kepala Seksi Perekonomi dan Pembangunan	8	850.000
2001	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2002	Pelaksana	7	750.000
2003	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN RUKUN LIMA		
2004	Lurah Rukun Lima	9	925.000
2005	Sekretaris Kelurahan Rukun Lima	8	850.000
2006	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2007	Kepala Seksi Perekonomi dan Pembangunan	8	850.000
2008	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2009	Pelaksana	7	750.000
2010	Pelaksana	6	700.000
2011	Pelaksana	5	550.000
	XXXVII KECAMATAN ENDE UTARA		
2012	Camat Ende Utara	12	1.750.000
2013	Sekretaris Kecamatan Ende Utara	11	1.350.000
2014	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2015	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2016	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2018	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2019	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	9	925.000
2020	Kepala Seksi Pelayanan Umum Ende Utara	8	850.000
2021	Pelaksana	7	750.000
2022	Pelaksana	6	700.000
2023	Pelaksana	5	550.000
2024	Pelaksana	3	500.000
2025	Pelaksana	1	500.000
	KELURAHAN KOTARAJA		
2026	Lurah Kotaraja	9	925.000
2027	Sekretaris Kelurahan Kotaraja	8	850.000
2028	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2029	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2030	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2031	Pelaksana	7	750.000
2032	Pelaksana	6	700.000
2033	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN KOTARATU		
2034	Lurah Kotaratu	9	925.000
2035	Sekretaris Kelurahan Kotaratu	8	850.000
2036	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2037	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2038	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2039	Pelaksana	7	750.000
2040	Pelaksana	6	700.000
2041	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN ROWORENA		
2042	Lurah Roworena	9	925.000
2043	Sekretaris Kelurahan Roworena	8	850.000
2044	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000

Paraf

7 4 8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
2045	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2046	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2047	Pelaksana	7	750.000
2048	Pelaksana	6	700.000
2049	Pelaksana	5	550.000
	KELURAHAN ROWORENA BARAT		
2050	Lurah Roworena Barat	9	925.000
2051	Sekretaris Kelurahan Roworena Barat	8	850.000
2052	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2053	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2054	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2055	Pelaksana	7	750.000
2056	Pelaksana	6	700.000
2057	Pelaksana	5	550.000
	XXXVIII KECAMATAN ENDE		
2058	Camat Ende	12	1.750.000
2059	Sekretaris Kecamatan Ende	11	1.350.000
2060	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2061	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2062	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2063	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2064	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2065	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2066	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2067	Pelaksana	7	750.000
2068	Pelaksana	6	700.000
2069	Pelaksana	5	550.000
2070	Pelaksana	3	500.000
2071	Pelaksana	1	500.000
	XXXIX KECAMATAN DETUSOKO		
2073	Camat Detusoko	12	1.750.000
2074	Sekretaris Kecamatan Detusoko	11	1.350.000
2075	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2076	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2077	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2078	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2079	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2080	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2081	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2082	Pelaksana	7	750.000
2083	Pelaksana	6	700.000
2084	Pelaksana	5	550.000
2085	Pelaksana	3	500.000
2086	Pelaksana	1	500.000
	KELURAHAN DETUSOKO		
2087	Lurah Detusoko	9	925.000
2088	Sekretaris Kelurahan Detusoko	8	850.000
2089	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2090	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2091	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2092	Pelaksana	7	750.000
2093	Pelaksana	6	700.000
2094	Pelaksana	5	550.000
	XL KECAMATAN PULAU ENDE		
2095	Camat Pulau Ende	12	1.750.000
2096	Sekretaris Kecamatan Pulau Ende	11	1.350.000
2097	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2098	Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2099	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2100	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2101	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2102	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	9	925.000
2103	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2104	Pelaksana	7	750.000
2105	Pelaksana	6	700.000

Paraf

(Handwritten signatures)

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
2106	Pelaksana	5	550.000
2107	Pelaksana	1	500.000
XLI	KECAMATAN WOLOWARU		
2108	Camat Woloowaru	12	1.750.000
2109	Sekretaris Kecamatan Woloowaru	11	1.350.000
2110	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2112	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2113	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2114	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2115	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2116	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2117	Pelaksana	7	750.000
2118	Pelaksana	6	700.000
2119	Pelaksana	5	550.000
2120	Pelaksana	3	500.000
	KELURAHAN BOKASAPE		
2121	Lurah Bokasape	9	925.000
2122	Sekretaris Kelurahan Bokasape	8	850.000
2123	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2124	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2125	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2126	Pelaksana	7	750.000
2127	Pelaksana	6	700.000
2128	Pelaksana	5	550.000
XLII	KECAMATAN NANGAPANDA		
2129	Camat Nangapanda	12	1.750.000
2130	Sekretaris Kecamatan Nangapanda	11	1.350.000
2131	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2132	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2133	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2134	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2135	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2136	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2137	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2138	Pelaksana	7	750.000
2139	Pelaksana	6	700.000
2140	Pelaksana	5	550.000
2141	Pelaksana	3	500.000
	KELURAHAN NDORUREA		
2142	Lurah Ndururea	9	925.000
2143	Sekretaris Kelurahan Ndururea	8	850.000
2144	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2145	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2146	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2147	Pelaksana	6	700.000
2148	Pelaksana	5	550.000
XLIII	KECAMATAN WOLOJITA		
2149	Camat Wolojita	12	1.750.000
2150	Sekretaris Kecamatan Wolojita	11	1.350.000
2151	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2152	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2153	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2154	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2155	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2156	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2157	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2158	Pelaksana	7	750.000
2159	Pelaksana	6	700.000
2160	Pelaksana	5	550.000
2161	Pelaksana	3	500.000
2162	Pelaksana	1	500.000

Paraf		
7	1	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
KELURAHAN WOLOJITA			
2163	Lurah Wolojita	9	925.000
2164	Sekretaris Kelurahan Wolojita	8	850.000
2165	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2166	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2167	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2168	Pelaksana	7	750.000
2169	Pelaksana	6	700.000
2170	Pelaksana	5	550.000
XLIV KECAMATAN NDONA TIMUR			
2171	Camat Ndona Timur	12	1.750.000
2172	Sekretaris Kecamatan Ndona Timur	11	1.350.000
2173	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2174	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2175	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2176	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2177	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2178	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2179	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2180	Pelaksana	7	750.000
2181	Pelaksana	6	700.000
2182	Pelaksana	5	550.000
2183	Pelaksana	3	500.000
2184	Pelaksana	1	500.000
XLV KECAMATAN MAUKARO			
2185	Camat Maukaro	12	1.750.000
2186	Sekretaris Kecamatan Maukaro	11	1.350.000
2187	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2188	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2189	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2190	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2191	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2192	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	9	925.000
2193	Kepala Seksi Pelayanan Umum	9	925.000
2194	Pelaksana	7	750.000
2195	Pelaksana	6	700.000
2196	Pelaksana	5	550.000
2197	Pelaksana	3	500.000
2198	Pelaksana	1	500.000
XLVI KECAMATAN LIO TIMUR			
2199	Camat Lio Timur	12	1.750.000
2200	Sekretaris Kecamatan Lio Timur	11	1.350.000
2201	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2202	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2203	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2204	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2205	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2206	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2207	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2208	Pelaksana	7	750.000
2209	Pelaksana	6	700.000
2210	Pelaksana	5	550.000
2211	Pelaksana	3	500.000
2212	Pelaksana	1	500.000
KELURAHAN WATUNESO			
2213	Lurah Watuneso	9	925.000
2214	Sekretaris Kelurahan Watuneso	8	850.000
2215	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	850.000
2216	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	850.000
2217	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2218	Pelaksana	7	750.000
2219	Pelaksana	6	700.000
2220	Pelaksana	5	550.000

Paraf





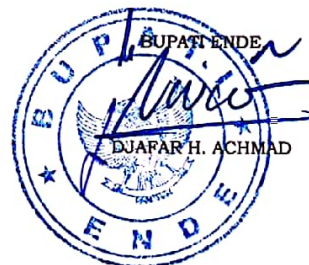
No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
XLVII	KECAMATAN MAUROLE		
2221	Camat Maurole	12	1.750.000
2222	Sekretaris Kecamatan Maurole	11	1.350.000
2223	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2224	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2225	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2226	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2227	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2228	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2229	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2230	Pelaksana	7	750.000
2231	Pelaksana	6	700.000
2232	Pelaksana	5	550.000
2233	Pelaksana	3	500.000
2234	Pelaksana	1	500.000
XLVIII	KECAMATAN WEWARIA		
2235	Camat Wewaria	12	1.750.000
2236	Sekretaris Kecamatan Wewaria	11	1.350.000
2237	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2238	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2239	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2240	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2241	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2242	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2243	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2244	Pelaksana	7	750.000
2245	Pelaksana	6	700.000
2246	Pelaksana	5	550.000
2247	Pelaksana	3	500.000
XLIX	KECAMATAN KOTABARU		
2248	Camat Kotabaru	12	1.750.000
2249	Sekretaris Kecamatan Kotabaru	11	1.350.000
2250	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2251	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2252	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2253	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2254	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2255	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2256	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2257	Pelaksana	7	750.000
2258	Pelaksana	6	700.000
2259	Pelaksana	5	550.000
2260	Pelaksana	3	500.000
L	KECAMATAN DETUKELI		
2261	Camat Detukeli	12	1.750.000
2262	Sekretaris Kecamatan Detukeli	11	1.350.000
2263	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2264	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2265	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2266	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2267	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	9	925.000
2268	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2269	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2270	Pelaksana	7	750.000
2271	Pelaksana	6	700.000
2272	Pelaksana	5	550.000
2273	Pelaksana	3	500.000
LI	KECAMATAN KELIMUTU		
2274	Camat Kelimutu	12	1.750.000
2275	Sekretaris Kecamatan Kelimutu	11	1.350.000
2276	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	8	850.000
2277	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2278	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2279	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2280	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000

Paraf






No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan (Rp.)
1	2	3	4
2281	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2282	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2283	Pelaksana	7	750.000
2284	Pelaksana	6	700.000
2285	Pelaksana	5	550.000
2286	Pelaksana	3	500.000
2287	Pelaksana	1	500.000
LII KECAMATAN LEPMBUSU KELISOKE			
2288	Camat Lepembusu Kelisoke	12	1.750.000
2289	Sekretaris Kecamatan Lepembusu Kelisoke	11	1.350.000
2290	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2291	Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2292	Kepala Seksi Pemerintahan	8	850.000
2293	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2294	Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas	9	925.000
2295	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	850.000
2296	Kepala Seksi Pelayanan Umum	9	925.000
2297	Pelaksana	7	750.000
2298	Pelaksana	6	700.000
2299	Pelaksana	5	550.000
2300	Pelaksana	3	500.000
2301	Pelaksana	1	500.000
LIII KECAMATAN NDORI			
2302	Camat Ndori	12	1.750.000
2303	Sekretaris Kecamatan Ndori	11	1.350.000
2304	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	9	925.000
2305	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	850.000
2306	Kepala Seksi Pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan Linmas	8	850.000
2307	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	850.000
2308	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	850.000
2309	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	9	925.000
2310	Pelaksana	7	750.000
2311	Pelaksana	6	700.000
2312	Pelaksana	5	550.000
2313	Pelaksana	3	500.000
2314	Pelaksana	1	500.000



Paraf			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TANGGAL 16 Juli 2021

I. DAFTAR HADIR HARI SENIN s.d KAMIS

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah :
 Bulan :
 Hari/Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Apel Pagi 07.30-07.45	Keterlambatan(TL)				Pulang Sebelum Waktu (PSW)				Cuti	Ketidakhadiran	
				TL 1 07.46-08.16	TL 2 08.16-08.46	TL 3 08.46-09.16	TL 4 > 09.16	PSW 1 14.59-14.29	PSW 2 14.29-13.59	PSW 3 13.59-13.29	PSW 4 > 13.29		Ijin	Tanpa Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pimpinan Perangkat Daerah

.....

Paraf		
		

II. DAFTAR HADIR HARI JUM'AT

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah :
Bulan :
Hari/Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Apel Pagi 07.30-07.45	Keterlambatan(TL)				Pulang Sebelum Waktu (PSW)				Cuti	Ketidakhadiran	
				TL 1 07.46-08.16	TL 2 08.16-08.46	TL 3 08.46-09.16	TL 4 > 09.16	PSW 1 14.59-14.29	PSW 2 14.29-13.59	PSW 3 13.59-13.29	PSW 4 > 13.29		Ijin	Tanpa Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pimpinan Perangkat Daerah

Keterangan

Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2 diisi nama ASN dan NIP
Kolom 3 diisi berdasarkan pangkat/golongan ASN
Kolom 4-14 diberi tanda silang oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk



Paraf		
+	+	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TANGGAL 16 Juli 2021

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN

Perangkat Daerah :
 Bulan :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Ketidakhadiran			Apel Pagi	Keterlambatan(TL)					Pulang Sebelum Waktu (PSW)					Cuti	% Jumlah Pengurangan
			Ijin	Tanpa Keterangan	% Jumlah Ketidakhadiran		TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	% Jumlah TL	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	% Jumlah PSW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Pimpinan Perangkat Daerah

.....

Paraf		
1	1	1

Keterangan

Kolom 1	dusi dengan nomor urut
Kolom 2	dusi dengan nama dan NIP ASN
Kolom 3	dusi berdasarkan pangkat dan golongan
Kolom 4	dusi dengan akumulasi ketidakhadiran Ijin bulan berkenan
Kolom 5	dusi dengan akumulasi hari ketidakhadiran Tanpa Keterangan bulan berkenan
Kolom 6	dihitung dengan rumus jumlah ketidakhadiran Ijin ditambah Tanpa Keterangan dikalikan 3% (Pasal 16 Ayat (1))
Kolom 7	dihitung dengan rumus jumlah tidak mengikut apel pagi bulan berkenan bulan berkenan dikali 2% (Pasal 16 Ayat (2) Huruf c)
Kolom 8-11	dihitung dengan rumus jumlah TL dikali persentase merujuk pada Pasal 16 ayat (2) huruf a
Kolom 12	dihitung dengan rumus kolom 8 ditambah kolom 9 ditambah kolom 10 ditambah kolom 11
Kolom 13-16	dihitung dengan rumus jumlah PSW dikali persentase merujuk pada Pasal 16 ayat (2) huruf b
Kolom 17	dihitung dengan rumus kolom 13 ditambah kolom 14 ditambah kolom 15 ditambah kolom 16
Kolom 18	dihitung dengan rumus 1,5% dikali jumlah hari cuti, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) huruf d
Kolom 19	dihitung dengan rumus kolom 6 ditambah kolom 7 ditambah kolom 12 ditambah kolom 17 ditambah kolom 18, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) huruf e



Paraf		

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TANGGAL 16 Juli 2021

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :
 Bulan :

Bulan :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Produktivitas Kerja 70%				Kehadiran 30%			Plt. (Rp)	Jumlah TPP Kotor (Rp)	PPh Ps. 21 (Rp)	Jumlah TPP Netto (Rp)	
						Pagu (Rp)	Nilai	% Pembayaran	Harga	Pagu (Rp)	Jumlah Pengurangan						Harga Kehadiran (Rp)
											%	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah																	

Pengguna Anggaran,

.....

Ende, 2021
 Bendahara,

.....

Paraf		
t	g	f

Keterangan:

- Kolom 1 diisi nomor urut
- Kolom 2 diisi nama dan NIP ASN
- Kolom 3 diisi berdasarkan pangkat/golongan ASN
- Kolom 4 diisi berdasarkan jabatan ASN
- Kolom 5 diisi berdasarkan Kelas Jabatan
- Kolom 6 diisi besaran TPP dari Lampiran 1
- Kolom 7 diisi dengan rumusan 70% dikali kolom 6
- Kolom 8 diisi nilai produktivitas kerja bulan berkenan
- Kolom 9 diisi sesuai ketentuan Pasal 14
- Kolom 10 diisi dengan rumusan kolom 7 dikali kolom 9
- Kolom 11 diisi dengan rumusan 30% dikali kolom 6
- Kolom 12 diisi dengan akumulasi % pengurangan dalam bulan berkenan
- Kolom 13 diisi dengan rumusan kolom 11 dikali kolom 12
- Kolom 14 diisi dengan rumusan kolom 11 dikurangi kolom 13
- Kolom 15 diisi jika ASN tersebut menjabat sebagai Plt. merujuk pada pasal 28
- Kolom 16 diisi dengan rumusan kolom 10 ditambah kolom 14 ditambah kolom 15
- Kolom 17 dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan
- Kolom 18 diisi dengan rumusan kolom 16 dikurangi kolom 17



Paraf		
f	h	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TANGGAL 16 Juli 2021

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :
 Bulan :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP Kotor (Rp)	PPh Ps. 21 (Rp)	Jumlah TPP Netto	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6								6
7								7
8								8
9								9
10								10
11								11
12								12
13								13
14								14
15								15
16								16
17								17
18								18
19								19
20								20
21								21
22	dst							22
Jumlah								

Pengguna Anggaran,

Ende, 2021
 Bendahara,



Paraf		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2021
TANGGAL 16 Juli 2021

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(S P T M)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

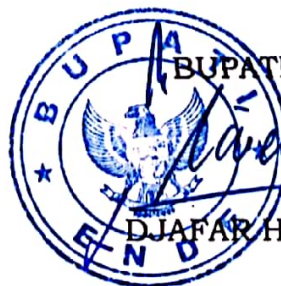
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Tambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bulan 2021(OPD)..... Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 telah dihitung benar;
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tunjangan Kesejahteraan Daerah menjadi tanggung jawab kami;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Tambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ende, 2021

Pengguna Anggaran,

 BUPATI ENDE
DJAFAH H. ACHMAD

Paraf		
+	M	